

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah adalah pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi kepada daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan rasa keadilan dan kepatuhan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat sendiri. Dalam melakukan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak akan berhasil tanpa adanya pemerintahan desa karena pemerintahan desa termasuk dalam pemerintahan daerah. Oleh karena itu, muncul adanya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Desa diberikan kesempatan yang lebih besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat terpenuhi dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah,

kemiskinan dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Untuk mendapatkan tujuan tersebut maka undang-undang desa membuat kebijakan tata kelola desa yang mana kebijakan tersebut memberikan kesempatan besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kebijakan tersebut diantaranya adalah adanya alokasi anggaran dana desa dengan jumlah besar kepada seluruh desa di Indonesia. Dana tersebut didapatkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dana desa dalam jumlah besar sudah dianggarkan oleh pemerintah setiap tahun selalu ditingkatkan sesuai dengan pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa.

Anggaran untuk desa bukan hanya dana desa. Desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan yang lain, diantaranya pendapatan hasil desa (hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, lain-lain pendapatan desa), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota (paling sedikit 10%), Alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum), bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola

berdasarkan salah satu asas yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas ini merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar pengelolaan dana desa berjalan baik maka harus terciptanya akuntabilitas.

Menurut Kantor Pelayanan Perbendaharaan pada 31 Maret 2021, meskipun telah mendapatkan alokasi anggaran dana desa yang sangat besar penyelenggaraan desa belum berjalan baik. Tidak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan dana desa. Hal ini berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas sumber daya manusianya, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal maka akuntabilitas belum tercapai. (KPPN BKT-djpb.kemenkeu, 2021)

Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan, menyatakan 15.100 Potensi Kelemahan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Besarnya dana desa yang akan diterima setiap desa di seluruh Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak. Ini disebabkan terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Karena terdapat kelemahan akuntabilitas berupa perbedaan jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau

RPJM Kabupaten/ Kota dengan RPJM Desa dapat menimbulkan ketidakselarasan pembangunan antara pemerintah daerah Kabupaten/ Kota dengan desa. Kualitas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran dana desa dapat berkurang mengingat kurangnya keterbukaan. Perencanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kekhasan daerah sehingga berpotensi bagi tidak tercapainya sasaran, tujuan, dan visi desa, yakni kesejahteraan masyarakat desa. Pertanggungjawaban publik oleh kepala desa dalam perencanaan dan penyusunan anggaran belum dilakukan baik kepada Badan Permusyawaratan Desa maupun kepada masyarakat desa. (Puslitbangwas-bpkp, 2022)

Telaah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) pada tahun 2019. Terdapat beberapa permasalahan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Permasalahan pada aspek pengawasan pengelolaan dana desa, yaitu mengenai perencanaan pengawasan oleh pemerintah daerah yang belum mempertimbangkan risiko hal itu terlihat dari masih adanya pemerintah daerah yang tidak memiliki rencana dan pemetaan masalah dalam pembuatan kegiatan pengawasan. Dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa dapat akuntabilitas diharapkan tujuan pembangunan dan pemberdayaan desa dapat tercapai sesuai ketentuan perundang-undangan (dpr.go.id, 2021).

Akuntabilitas ialah salah satu indikator dalam mengukur kinerja suatu pemerintahan dalam mendapatkan kepercayaan dan partisipasi dari masyarakat. Tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diketahui melalui

pengawasan mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. Menurut Mardiasmo (2017) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas adalah sebuah kewajiban, melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggung jawaban yang dikerjakan secara berkala.

Akuntabilitas dapat menyampaikan gambaran dari sumber daya yang dikelola oleh pemerintah dan menjadi sebuah kontrol terhadap segala aktivitas aparatur desa dalam mengelola dana desa, sehingga peran mereka dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa sangat penting. Dengan akuntabilitas pemerintah akan mendapat dukungan kepercayaan dari masyarakat atas apa yang direncanakan, dilaksanakan dan diselenggarakan dari program kegiatan untuk kepentingan masyarakat.

Terciptanya akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak lepas dari kompetensi aparatur itu sendiri. Kompetensi aparatur desa ini sangat dibutuhkan agar pengelolaan dana desa dalam pembangunan segala aspek dapat diterwujud dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan desa yang optimal. Kompetensi yang kompeten dapat membantu aparatur desa dalam melaksanakan tugasnya, sehingga aparatur desa dapat lebih memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa dengan baik serta mengurangi atau tidak ada kekeliruan dalam membuat laporan keuangan yang dibuatnya dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi pada 11 desember 2021 mengatakan perangkat desa harus sejahtera, karena saat ini terdapat permasalahan perangkat desa yaitu kurangnya kompetensi aparatur ini disebabkan aspek pembinaan pengelolaan dana desa antara lain belum adanya regulasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa dan pembinaan aparatur desa yang lengkap, mutakhir dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. (Koranindonesia, 2021)

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong perangkat desa di Indonesia untuk ikut meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) bagi masyarakat desa, ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (KEMANKER) Anwar saat saat membuka Sosialisai Pelatihan Vokasi dan Pemagangan bagi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), di Bekasi, Jawa Barat (Minggu, 28 November 2021). Caranya, dengan menggelar pelatihan kerja, baik pelatihan berbasis kompetensi maupun dengan sistem pemagangan ini bertujuan penumbuh kembangan kewirausahaan perdesaan, pengembangan SDM unggul perdesaan, pengembangan perekonomian perdesaan, serta pengembangan dan integrasi data dan informasi terkait dengan pengembangan ekonomi desa. (Yudistira Imandiar-detikNews, 2021)

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Sekda Kabupaten Subang, di Kantor Bupati Subang, Jawa Barat, Rabu (29/9/2021) memaparkan Kabupaten subang merupakan salah satu kabupaten yang mendapat kucuran alokasi dana besar untuk desa, akan tetapi penyelenggara pemerintahan desa di Subang belum optimal.

Performa desa belum banyak berubah. Hal ini disebabkan mulai minimnya regulasi, tata kelola pemerintahan yang belum profesional sehingga kapasitas Sumber Daya Manusia desa masih rendah. Sumber daya manusia aparatur desa dari sisi pendidikan, 18% lulusan sarjana, 18% lulusan D3, 63% lulusan SLTA, selebihnya adalah lulusan SMP, SD dan bahkan ada yang tidak lulus sekolah. Sumber Daya Manusia aparatur desa masih rendah, menyebabkan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa belum optimal. (dpr.go.id, 2021)

Pentingnya kompetensi aparatur desa sebagai pengelola dana desa karena berpengaruh terhadap kualitas laporan yang dihasilkan, maka pemerintah perlu upaya adanya kegiatan pendidikan ataupun pelatihan serta pengalaman. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh sumber daya manusia, karena laporan keuangan yang berkualitas tidak mampu terealisasi tanpa adanya keterlibatan sumber daya manusia (Ferina, 2016).

Kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang ada pada aparatur desa didapatkan dari pendidikan, pelatihan dan pengalaman sehingga mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Semakin tinggi kompetensi aparat pengelola keuangan desa maka pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa akan semakin akuntabel dan sebaliknya, jika semakin rendah kompetensi aparat aparat pengelola keuangan desa maka pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa akan tidak akuntabel. Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, memadai dan dapat diandalkan (Yulianti et al., 2018).

Untuk tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana desa, komponen yang dibutuhkan tidak hanya dari kompetensi aparatur saja, pemahaman mengenai teknologi informasi merupakan faktor penting dalam akuntabilitas. Adanya teknologi informasi membantu dan memudahkan dalam melakukan kegiatan dan pekerjaannya. Pemanfaatan teknologi ini dapat mengurangi terjadinya kesalahan karena kegiatan atau aktivitas pengelolaan dana desa tercatat dengan sistematis dan tersimpan dengan baik sehingga menghasilkan laporan yang berkualitas. Kewajiban untuk pemahaman teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, untuk menindaklanjuti terselanggeranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Menurut Fachrul Razi Ketua Komite I DPD RI dalam artikel dengan judul Lewat Revisi UU Desa, DPD RI Berjuang Demi Kesejahteraan Perangkat Desa (Kamis, 25 November 2021). Menyatakan selain masalah kesejahteraan, terdapat permasalahan yang saat ini terus diperjuangkan DPD RI melalui revisi UU Desa. DPD RI terus berjuang mencari solusi agar UU Desa dalam melindungi aparatur desa secara hukum. Berbagai persoalan yang sedang dihadapi yaitu pembentukan perangkat desa mengabaikan kebutuhan di desa, disamping itu mengabaikan syarat, kapasitas, dan kompetensi. Permasalahan lainnya terkait kualitas perangkat desa

masih rendah terkait pemanfaatan teknologi informasi, dan perencanaan dan pengelolaan keuangan/dana desa. (Tribunnews.com, 2021)

Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat berkomitmen memajukan desa. Hal itu dikatakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan HUT Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Kamis (25/11/2021). Salah satunya dengan memberikan dukungan pendanaan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemda Provinsi Jabar juga memiliki program Desa Digital. Desa Digital merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet dalam pengembangan potensi desa, pemasaran dan percepatan akses serta pelayanan informasi. (Teti Purwanti-CNBC Indonesia, 2021)

Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi, S.Si, MM untuk membantu aparatur dalam mengelola dana desa, pemerintah menyediakan sistem tata kelola keuangan desa dengan aplikasi Siskeudes diantaranya mempermudah aparat desa dalam merencanakan kegiatan, penatausahaan keuangan, penyusunan laporan, serta akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Diharapkan aparatur desa lebih memanfaatkan aplikasi ini agar tata kelola keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi dengan kompetensi aparatur desa yang masih rendah menyebabkan kurangnya aparatur desa dalam pemahaman teknologi informasi yang tersedia. (Subang.go.id, 2021)

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan,

memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. (Tata Sutabri 2012:3)

Teknologi informasi yang baik akan memberikan dampak yang positif bagi pengelolaan keuangan pemerintah daerah khususnya pengelolaan dana desa. Teknologi informasi mempunyai kelebihan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi datanya. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan data, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dikarenakan dengan teknologi informasi data yang diolah akan mempermudah aparatur dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat.

Terkait dengan pengaruh kompetensi aparatur desa dan pemahaman teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah banyak dilakukan penelitian, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Siti Sarah et al. (2020) berjudul Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat dan SPI Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu. Menunjukkan hasil bahwa kompetensi aparatur dan pemahaman teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Nur Aziiz dan Sawitri Dwi Prastiti (2019) dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. Hasil dari penelitian tersebut bahwa kompetensi aparat

desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan SPIP mempengaruhi akuntabilitas dana desa di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widia Yulianti et.al (2018) mengenai Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, *Internal Control* terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Empiris di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Kompetensi aparat, Sistem akuntansi, *Internal control* pengelola keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa.

Sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nafadhila Eka (2021) dengan judul penelitian Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Penelitian ini memfokuskan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siti Sarah et al. (2020), penelitian ini memfokuskan pada variabel kompetensi aparatur dan pemahaman teknologi informasi. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu jumlah variabel independen yang digunakan, penulis menggunakan dua variabel independen yaitu kompetensi aparatur desa dan pemahaman teknologi informasi sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan empat variabel independen. Salah satu variabel independen penelitian sebelumnya

menggunakan variabel independen Pemanfaatan Teknologi Informasi sedangkan penelitian ini menggunakan variabel independen Pemahaman Teknologi Informasi. Lokasi penelitian pada penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Subang. Populasi pada penelitian sebelumnya mengambil sebanyak 16 desa sedangkan populasi penelitian ini sebanyak 25 desa. Kriteria responden yang diambil penelitian sebelumnya yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Pemerintahan dan Kaur Perencanaan dan Kaur Tata Usaha dan Umum sedangkan penelitian ini hanya Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan. Alasan penelitian di Kabupaten Subang karena berdasarkan fenomena-fenomena yang dipaparkan diatas bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Subang belum optimal karena kurangnya kompetensi aparatur dan pemahaman mengenai teknologi informasi.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Akuntansi Pemerintah dan menuangkannya ke dalam laporan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Pemahaman Teknolgi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan beberapa identifikasi masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Pengelolaan dana desa belum berjalan baik

2. Perangkat desa belum kritis mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
3. Adanya kesalahan pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.
4. Kabupaten Subang minimnya regulasi, tata kelola pemerintahan yang belum profesional.
5. Kualitas perangkat desa masih rendah terkait pemanfaatan teknologi informasi, dan perencanaan pengelolaan dana desa.
6. Kurangnya aparatur desa dalam pemahaman teknologi informasi.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunan penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana kompetensi aparatur desa pada desa di Kabupaten Subang.
2. Bagaimana pemahaman teknologi informasi pada desa di Kabupaten Subang.
3. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Subang.
4. Seberapa besar pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Subang.
5. Seberapa besar pengaruh pemahaman teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Subang.

6. Seberapa besar pengaruh kompetensi aparatur desa dan pemahaman teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Subang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui kompetensi aparatur desa pada desa di Kabupaten Subang.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pemahaman teknologi informasi pada desa di Kabupaten Subang.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Subang.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Subang.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pemahaman teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Subang.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya kompetensi aparatur desa dan pemahaman teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Subang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tentang bahan informasi yang digunakan dalam hal Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Subang melalui Kompetensi Aparatur desa dan Pemahaman Teknologi Informasi sehingga tujuan pemerintahan desa dapat tercapai.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, khususnya mengenai Kompetensi Aparatur desa dan Pemahaman Teknologi Informasi, serta sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

2. Bagi Instansi

Pemerintah Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah mengenai masalah Kompetensi Aparatur Desa dan Pemahaman Teknologi Informasi dalam meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

3. Bagi Instansi Pendidikan

Masyarakat akademik pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya sebagai bahan referensi bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan masalah ini.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Agar dalam penulisan penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penelitian membatasi ruang lingkup pembahasannya sesuai dengan pembahasan tentang pengaruh kompetensi aparatur desa dan pemahaman teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Subang. Data yang diperoleh berasal dari responden yaitu aparatur desa (kepala desa, sekretaris desa, bendahara) yang bekerja dikantor desa melalui kuisioner.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kompetensi Aparatur Desa

2.1.1.1 Pengertian Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi adalah karakteristik dasar atau kemampuan sumber daya manusia dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai. Tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat kerja yang diharapkan untuk kategori baik atau rata-rata. Penentuan ambang kompetensi yang dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan dasar bagi proses seleksi, perencanaan, evaluasi kinerja, dan pengembangan sumber daya manusia. Menurut beberapa ahli definisi kompetensi diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Abdullah M. Ma'ruf. (2014:51) pengertian Kompetensi adalah sebagai berikut:

“Kompetensi merupakan kemampuan (*ability*) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, dimana kemampuan ini ditentukan oleh 2 (dua) faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.”

Menurut Wibowo (2014:320) menyatakan bahwa definisi kompetensi Aparatur adalah Suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang

dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh perilaku dan sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

Menurut Moeheriono (2015:5) menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur adalah sebagai berikut:

“Kompetensi aparatur adalah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berfikir, sikap, dan bertindak seseorang serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu.”

Menurut Sedarmayanti (2017:236) menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur adalah sebagai berikut:

“Kompetensi aparatur adalah kompetensi yang merujuk pada pendekatan perilaku, perilaku tertentu atau tipe dan tingkat perilaku yang berbeda yang dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil dan unggul/superior”

Menurut Sudarmanto (2015:46) menyatakan bahwa Kompetensi yaitu:

“Kompetensi sebagai atribut kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap kinerja individu. Merupakan karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi.”

Sedangkan menurut *Spencer dan Spencer* dalam Moeheriono (2014:5) menjelaskan kompetensi adalah :

“A competency is an underlying characteristic of an individual that is causally related to criterion referenced effective and or superior performance in a job or situation.”

“Keistimewaan yang menjadi dasar awal seseorang berhubungan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang dimiliki sebagai sebab akibat dengan standar yang dijadikan tolak ukur dalam berkinerja secara prima ditempat kerja atau pada situasi tertentu.”

Jadi dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa merupakan kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa itu sendiri

untuk bekerja melaksanakan tugas atau aktivitas yang diberikan untuk mencapai tujuannya. Perangkat desa adalah aparatur desa dibawah pimpinan kepala desa. Sebagai salah satu faktor pelaku desa, perangkat desa mempunyai peran penting tersendiri dalam membuat kemajuan bangsa melalui desa.

2.1.1.2 Jenis - Jenis Kompetensi Aparatur

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 69 ayat (1) tentang Aparatur Sipil Negara, terdapat 3 jenis kompetensi yaitu:

1. “Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis.
2. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
3. Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.”

Menurut Moeheriono (2018) ada 3 jenis kompetensi yang dimiliki oleh

Sumber Daya Manusia, antara lain :

1. “Kompetensi Individu

Kompetensi individu adalah keahlian kerja yang melekat pada seseorang yang dapat menghubungkan keterampilan, pengetahuan dan sikap berdasarkan pembelajaran dan pengalaman dalam upaya pelaksanaan tugas secara professional, efektif dan efisien. Dalam kompetensi individu ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu terdiri atas kompetensi *threshold* atau dapat disebut juga dengan kompetensi minimum yaitu kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh seseorang, misalnya penguasaan pengetahuan atau kemampuan dasar seperti kemampuan/kemahiran membaca dan menulis, dan kompetensi *differentiating* yaitu kompetensi yang berguna agar bisa membedakan antara seseorang yang berkinerja tinggi atau berkinerja rendah antara yang satu dengan karyawan lainnya, misalnya seseorang yang mempunyai motivasi tinggi umumnya yang sering diperhatikan adalah pada tujuan melebihi apa yang ditargetkan oleh perusahaan didalam standar kerja. Kompetensi ini dapat difensikan sebagai keterampilan yang dapat menyesuaikan situasi atau *starting qualification*, yang isinya adalah keterampilan sosial dan komunikasi, teknik umum dan situasi berubah-ubah, kualitas organisasional serta pendekatan dasar pekerjaan dan situasi.”

2. Kompetensi Jabatan

Kompetensi jabatan (*job competency*), memiliki fungsi yang sangat berpengaruh dan harus mendapat perhatian khusus dari pihak manajemen karena aspek kompetensi jabatan sudah banyak dipakai sebagai dasar penentu posisi jabatan calon karyawan. Seseorang agar bisa mencapai kinerja tinggi secara maksimal semestinya antara kompetensi individu yang dimiliki harus sesuai dengan kompetensi jabatan yang diembannya, hal ini akan terjadi kecocokan (*matching*) dan kesesuaian dengan kemampuan yang dimilikinya. Moeheriono (2014) mengatakan berdasarkan standar kompetensi didalam kompetensi jabatan, terdapat dua komponen dasar, yaitu kompetensi pendukung dan kompetensi utama, rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Kompetensi utama yang wajib dimiliki oleh seseorang yang berhubungan dengan suatu jabatan pekerjaan pada ruang lingkup tertentu, agar penerapan jabatan tersebut berhasil dengan baik, maka harus meliputi:
 - Akuntabilitas
Menyusun pertanggungjawaban kinerja organisasi secara khusus yang meliputi perkembangan kinerja organisasi sesuai tujuan, pengukuran dan pelaporan, yaitu meliputi:
 - Mengembangkan sistem data base,
 - Menyusun laporan kinerja organisasi secara periodik,
 - Mengarahkan seluruh anggota organisasi untuk mewujudkan kinerja individu dan kinerja organisasi
 - Organisasi Pembelajaran
Menumbuhkan dan mengembangkan iklim organisasi dan komitmen seluruh individu, yaitu meliputi:
 - Mengembangkan dan memahamkan penempatan seluruh pimpinan dan staf karyawan sebagai salah satu tim serta sebagai kolega (bukan sebagai hubungan atasanbawahan),
 - Menumbuhkan dan mengembangkan iklim organisasi untuk mendorong inovasi.
 - Menentukan Masalah dan Memecahkannya
Menyiapkan dan mengambil keputusan, memecahkan masalah berdasarkan data yang valid melalui analisis dari berbagai aspek (*system thinking*), yaitu meliputi:
 - Mendelegasikan wewenang kepada bawahan secara proporsional.
 - Mengelola manajemen sumber daya manusia secara optimal,
 - Mengembangkan kebijakan internal pola karier karyawan (*competency-based appointment and rotation policy*).
 - Mengembangkan kebijakan internal dan mengembangkan sumber daya karyawan,
 - Mengembangkan kebijakan internal dan penilaian kinerja karyawan

- Mengembangkan kebijakan internal dan mendorong pencapaian kinerja tinggi
- Manajemen perubahan
Membuka diri (*openness to change*) menerima dan melakukan perubahan, yaitu meliputi:
 - Mengembangkan iklim organisasi kepada semua pimpinan dan karyawan untuk melakukan perubahan lebih baik.
 - Melakukan kajian aspek konsep maupun praktik dalam rangka mewujudkan kinerja yang tinggi.
 - Melakukan perubahan sejalan dengan perkembangan administrasi dan manajemen.
- Perencanaan strategi
Mengembangkan visi bersama (*shared vision*) secara terus-menerus sebagai komitmen bersama, yaitu meliputi:
 - Melakukan analisis secara komprehensif terhadap komitmen internal dan komitmen eksternal perusahaan,
 - Melakukan analisis secara komprehensif terhadap isu-isu strategis secara periodik,
 - Melakukan peninjauan ulang secara periodik terhadap rencana strategi.
- Manajemen kebijakan
Melakukan kebijakan-kebijakan dengan kegiatan, yaitu meliputi :
 - Mengidentifikasi perlunya kebijakan regional dan nasional,
 - Mengacu pada tugas pokok dan fungsi misi organisasi,
 - Mengarahkan dan mengimplementasikan kebijakan organisasi,
 - Melakukan evaluasi kebijakan secara kontinu.
- Manajemen kinerja (*management for result*)
Melakukan perencanaan kinerja (*performance planning*) sesuai rencana strategi, yaitu meliputi:
 - Menetapkan kegiatan untuk mewujudkan target kinerja organisasi,
 - Menetapkan anggaran berdasarkan kinerja organisasi,
 - Mengembangkan mekanisme pemantauan dan pengendalian,
 - Melakukan evaluasi kinerja organisasi secara periodik.
- Manajemen kualitas pelayanan
Mengembangkan iklim dan budaya organisasi pada kualitas pelayanan, yaitu meliputi:
 - Melakukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pelayanan (*service re-engineering*),
 - Menyusun standar pelayanan (*service standart*),
 - Mengembangkan pola mekanisme penilaian terhadap kualitas pelayanan (*quality standart*)
 - Melakukan pengukuran kualitas pelayanan (*services quality*).

- Manajemen kerjasama
Mengembangkan pola kerja sama atau aliansi stratejik terhadap internal maupun eksternal organisasi, yaitu meliputi:
 - Melakukan analisis internal tingkat kebutuhan dan manfaat kebutuhan,
 - Mengarahkan perencanaan dan penjajagan kerjasama,
 - Melakukan negosiasi untuk menghasilkan secara maksimal,
 - Membentuk dan mengarahkan tim internal organisasi untuk pengelolaan operasional,
 - Melakukan evaluasi terhadap kerjasama.
- b. Kompetensi pendukung merupakan kompetensi yang diperlukan untuk menunjang dan mendukung terlaksananya pelaksanaan jabatan tertentu, yang terdiri atas :
 - Komunikasi
 - Mengembangkan pola komunikasi formal dan informal baik secara vertikal, horizontal dan diagonal dalam unit organisasi,
 - Mengembangkan pola mekanisme penyebarluasan informasi dalam internal organisasi,
 - Mengembangkan pola dan mekanisme komunikasi eksternal organisasi,
 - Menyajikan dan mempresentasikan pemikiran konsep kebijakan.
 - Teknologi informasi
Memanfaatkann informasi teknologi untuk menunjang tugas dan tanggung jawab pekerjaan, yaitu meliputi mengembangkan iklim organisasi yang mendorong pimpinan dan karyawan untuk menunjang tugas dan tanggung jawabnya.
- 3. Kompetensi Organisasi
Untuk mempunyai kompetensi yang intensif dan ektensif, hendaknya organisasi bergantung pada kerangka visi organisasi itu sendiri (*organization vision framework*), karena hal ini merupakan sebuah core ideology yang terdiri atas *core value dan competence* di masa yang akan datang, yang menjadi harapan bagi organisasi. Maka, tanpa adanya *value dan core competence*, organisasi tidak akan tumbuh berkembang dengan subur pada tujuan yang telah dibuat sejak awal.”

Menurut Muins dalam Rohana Thahier (2012:10) ada 3 jenis kompetensi

yaitu:

1. “Kompetensi profesi, merupakan kemampuan untuk menguasai keterampilan/keahlian pada bidang tertentu, sehingga tenaga kerja mampu bekerja dengan tepat, cepat teratur dan bertanggung jawab.

2. Kompetensi individu, merupakan kemampuan yang diarahkan pada keunggulan tenaga kerja, baik penguasaan ilmu pengetahuan teknologi (Iptek) maupun daya saing kemampuannya.
3. Kompetensi sosial, merupakan kemampuan yang diarahkan pada kemampuan tenaga kerja dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga mampu mengaktualisasikan dirinya di lingkungan masyarakat maupun lingkungan kerjanya.”

Jenis kompetensi yang berbeda dikaitkan dengan aspek perilaku manusia dengan kemampuannya mendemonstrasikan kemampuan perilaku tersebut, dan beberapa jenis kompetensi tersebut menurut Wibowo (2013:97) adalah sebagai berikut :

1. *Planning Competency*
2. *Influence Competency*
3. *Communication Competency*
4. *Interpersonal Competency*
5. *Thinking Competency*
6. *Organizational Competency*
7. *Human Resources Management Competency*
8. *Leadership Competency*
9. *Client Service Competency*
10. *Self Management Competency*
11. *Business Competency*
12. *Technical/Operasional Competency*

Beberapa jenis kompetensi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Planning Competency*, dikaitkan dengan tindakan tertentu seperti menetapkan tujuan, menilai resiko dan mengembangkan urutan tindakan untuk mencapai tujuan
2. *Influence Competency*, dikaitkan dengan tindakan seperti mempunyai dampak pada orang lain, memaksa melakukan tindakan tertentu atau membuat keputusan tertentu, dan memberi insprirasi untuk bekerja menuju tujuan organisasi

3. *Communication Competency*, dalam bentuk kemampuan berbicara, mendengarkan orang lain, komunikasi tertulis dan nonverbal.
4. *Interpersonal Competency*, meliputi empati, pembangunan konsensus, *networking*, persuasi, negosiasi, diplomasi, manajemen konflik, menghargai orang lain dan *team player*.
5. *Thinking Competency*, berkenaan dengan berpikir strategis, berpikir analisis, berkomitmen terhadap tindakan, memerlukan kemampuan kognitif, mengidentifikasi mata rantai dan membangkitkan gagasan kreatif.
6. *Organizational Competency*, meliputi kemampuan merencanakan pekerjaan, mengorganisasi sumber daya, mendapatkan pekerjaan, mengukur kemajuan dan mengambil resiko yang diperhitungkan.
7. *Human Resources Management Competency*, merupakan kemampuan dalam bidang team building, mendorong partisipasi, mengembangkan bakat, mengusahakan umpan balik kinerja, dan menghargai keberagaman.
8. *Leadership Competency*, merupakan kompetensi yang meliputi kecakapan dalam mempoisikan diri, pengembangan organisasional, mengelola transisi, orientasi strategis, membangun visi, merencanakan masa depan, menguasai perubahan dan mempelopori kesehatan tempat kerja.
9. *Client Service Competency*, merupakan kompetensi yang berupa pengidentifikasi dan penganalisaan pelanggan, orientasi pelayanan dan pengiriman, bekerja dengan pelanggan, tindak lanjut dengan pelanggan, membangun partnership dan berkomitmen terhadap kualitas.

10. *Self Management Competency*, merupakan kompetensi yang berkaitan dengan menjadi motivasi diri, bertindak dengan percaya diri, mengelola pembelajaran sendiri, mendemonstrasikan fleksibilitas dan berinisiatif.
11. *Business Competency*, merupakan kompetensi yang meliputi manajemen finansial, keterampilan pengambilan keputusan bisnis, bekerja dalam sistem, menggunakan ketajaman bisnis, membuat keputusan bisnis dan membangkitkan pendapatan.
12. *Technical/Operasional Competency*, kompetensi yang berkaitan dengan: mengerjakan tugas kantor, bekerja dengan teknologi komputer, menggunakan peralatan lain, mendemonstrasikan keahlian teknis dan profesional dan membiasakan bekerja dengan data dan angka.

2.1.1.3 Manfaat Kompetensi Aparatur

Sutrisno Edy (2012:208) mengemukakan bahwa penggunaan konsep kompetensi manusia di dalam suatu organisasi digunakan atas berbagai alasan, yaitu:

1. “Memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai.
2. Alat seleksi karyawan.
3. Memaksimalkan produktivitas.
4. Dasar untuk pengembangan sistem remunerasi
5. Memudahkan adaptasi terhadap perubahan.
6. Menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. Model kompetensi merupakan cara yang paling mudah untuk mengomunikasikan nilai-nilai dan hal-hal apa saja yang harus menjadi fokus dalam unjuk kerja karyawan.”

Kompetensi terletak pada elemen setiap manusia dan selalu ada pada karakter seseorang yang dapat menggambarkan tingkah laku dan performansi

secara luas pada semua situasi dan tugas pekerjaan (*job tasks*) (Spencer dalam (Moeheriono, 2018). Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa maksud dan tujuan yang tercantum didalamnya, yaitu:

1. “Karakteristik dasar (*underlying characteristic*) berarti kompetensi merupakan bagian dari karakter yang mendasar pada diri seseorang dan memiliki perilaku yang dapat diperhitungkan didalam berbagai tugas atau pekerjaan.
2. Hubungan Kausal (*causally related*) artinya kompetensi dapat digunakan untuk memperkirakan kinerja atau kemampuan seseorang, artinya jika memiliki kompetensi yang bagus, maka akan memiliki pula kinerja yang bagus.
3. Kriteria Referansi (*criteria referenced*) yang menjadi tolak ukur kompetensi secara nyata dan dapat menggambarkan seseorang mampu bekerja secara baik, terukur dan spesifik (terstandar).”

2.1.1.4 Pengelolaan Kompetensi Aparatur

Jika membahas mengenai pengelolaan kompetensi aparatur desa, hal tersebut berarti kompetensi sumber daya manusia yang ada pada sebuah pemerintahan desa. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian sampai dengan evaluasi atau manajemennya.

Adapun yang harus dilakukan dalam mengelola kompetensi menurut Moeheriono (2014:292) adalah :

1. “Merencanakan Kompetensi.
Pada tahap ini, organisasi harus berpijak pada visi dan misi instansi yang kemudian diterjemahkan kedalam strategi fungsional yang ada. Maksudnya visi dan misi ini diterjemahkan kedalam strategi pengelolaan SDM-nya yang kemudian diterjemahkan menjadi tuntutan kompetensi SDM yang harus dipenuhi.
2. Pengorganisasian Kompetensi.
Setelah pemetaan kompetensi diketahui, organisasi harus melakukan pengelompokkan atas kompetensi tersebut. Pengelompokkan dilakukan melalui penentuan bidang-bidang kompetensi inti yang merupakan tonggak organisasi, maupun bidang kompetensi pendukung.
3. Mengembangkan Kompetensi.

Upaya ini dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap kompetensi yang saat ini telah dimiliki oleh SDM yang ada, kemudian dibandingkan dengan pemetaan kompetensi yang telah dibuat sehingga dapat diketahui kesenjangan/ketidakseimbangan antara kompetensi yang seharusnya dimiliki dengan yang diharapkan. Berangkat dari kondisi ini, selanjutnya organisasi melakukan berbagai upaya pembangunan dan pengembangan kompetensi SDM sehingga peta kompetensi tadi dapat terisi dengan baik.

4. Melakukan evaluasi terhadap kompetensi yang sudah dibangun dan dikembangkan untuk mengetahui sejauh mana upaya yang telah dilakukan telah mencapai peta kompetensi yang telah disusun. Upaya evaluasi harus senantiasa memperhatikan perkembangan situasi yang ada, sehingga apabila diperlukan, organisasi harus juga melakukan berbagai penyesuaian baik terhadap peta kompetensi maupun program pembangunan kompetensinya.”

2.1.1.5 Faktor-Faktor Pembentuk Kompetensi Sumber Daya Manusia

Semua organisasi tentu menginginkan sumber daya manusia mereka memiliki kompetensi yang baik dan dapat diandalkan, sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasi. Oleh karena itu itu diperlukan identifikasi terlebih dahulu terhadap faktor- faktor determinan bagi kompetensi.

Menurut Zwell dalam Sudarmato (2015:54) terdapat tujuan determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi, yakni:

1. “Kepercayaan dan nilai
Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki sikap tidak kreatif dan inovatif cenderung tidak berfikir dan bersikap untuk menemukan sesuatu yang baru dan memberikan tantangan bagi dirinya. Kepercayaan dan nilai seseorang dapat diubah, namun hal ini sangat sulit dan memakan waktu yang lama karena nilai dan kepercayaan seringkali telah menjadi karakter, pandangan, atau identitas seseorang. Lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap kepercayaan dan nilai, dan budaya perusahaan berdampak signifikan terhadap aspek-aspek kompetensi. Kompetensi berakar pada budaya organisasi. Budaya organisasi terbentuk dari aspek nilai dan kepercayaan seseorang.
2. Keahlian/keterampilan
Aspek ini memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk kompetensi, sebagai contoh, public speaking adalah keterampilan yang dapat dipelajari, dipraktikan, dan diperbaiki. Keahlian menulis juga dapat diperbaiki dengan instruksi, latihan dan umpan balik. Dengan memperbaiki

kemampuan bicara dan keterampilan menulis, seseorang secara tidak langsung juga meningkatkan kecakapan kompetensi komunikasinya. Pengembangan keahlian khusus yang berhubungan dapat berdampak pada budaya organisasi dan kompetensi individu.

3. Pengalaman

Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang. Seseorang dengan sejumlah pengalaman tertentu akan lebih mudah mengorganisir orang lain dalam organisasi yang kompleks dengan penguasaan kompetensi manajerialnya yang tinggi dan akan sangat berbeda apabila dibandingkan dengan seseorang yang tidak mempunyai pengalaman sama sekali. Akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang menyatu dalam diri seseorang akan menjadikan orang tersebut memiliki kompetensi yang tidak disadari dalam dirinya, atau akan terbentuk dalam sikap dan perilaku seseorang.

4. Karakteristik personal

Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Kompetensi seseorang dalam manajemen konflik dan negosiasi dari orang yang memiliki sifat introvert akan berbeda dengan orang yang memiliki sifat ekstrovert. Karakteristik kepribadian dapat diubah, tetapi cenderung lebih sulit.

5. Motivasi

Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai. Motivasi merupakan faktor kompetensi yang penting dan cenderung dapat diubah. Dorongan, pengarahan, pengakuan dan perhatian terhadap individu dapat berpengaruh terhadap motivasi seseorang.

6. Isu-isu emosional

Hambatan dan blok-blok emosional sering kali dapat membatasi penguasaan kompetensi. Kekuatan membuat kesalahan, perasaan malu, perasaan tidak suka, selalu berfikir negatif terhadap seseorang, pengalaman masa lalu yang selalu negatif sangat berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi seseorang. Hal-hal tersebut pada dasarnya dapat diubah dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif, melakukan beberapa terapi, melakukan seseorang agar dapat mengatasi hambatan dan blok-blok tersebut.

7. Kapasitas Intelektual

Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Kompetensi tergantung pada kemampuan kognitif, seperti berfikir konseptual dan berfikir analitis antara satu sama lain akan membedakan kompetensi seseorang dalam pengambilan keputusan, kompetensi perencanaan, dan nilai sebagainya.”

2.1.1.6 Komponen Kompetensi Aparatur

Sumber daya manusia yang berkualitas tentunya adalah tolak ukur yang dapat dijadikan patokan atau perbandingan agar bisa mengetahui sumber daya yang berkualitas. Dengan adanya batasan atau tolak ukur ini, dapat dijadikan landasan dalam menentukan kualitas pribadi sumber daya manusia.

Menurut Sudarmanto (2015:53) terdapat 5 (lima) komponen kompetensi sumber daya manusia, adalah sebagai berikut:

1. “Motif (*motive*), adalah hal-hal yang seseorang pikir atau inginkan secara konsisten yang menimbulkan tindakan.
Motif ini meliputi:
 - a. Menyelesaikan suatu tugas secara tepat waktu
 - b. Meningkatkan kinerja dan prestasi
 - c. Meningkatkan kompetensi
2. Sifat (*traits*), adalah karakteristik fisik dan respon-respon konsisten terhadap situasi atau informasi.
Sifat meliputi:
 - a. Berani ikut serta dalam pengambilan keputusan
 - b. Mengikuti aturan sistem dan standar yang berlaku
 - c. Mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku
3. Konsep diri (*self-concept*), adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Konsep diri terdiri dari :
 - a. Memiliki sikap profesional dalam melaksanakan pekerjaan
 - b. Melakukan pengembangan diri secara terus menerus
 - c. Mengikuti/Melaksanakan pekerjaan secara mandiri
4. Pengetahuan (*knowledge*), adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan merupakan suatu hal yang kompleks yang terdiri dari:
 - a. Memahami Peraturan yang ada
 - b. Mengetahui mengenai prosedur yang ada
 - c. Mengetahui perkembangan mengenai suatu bidang yang ada
5. Keterampilan (*skill*), adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Keterampilan meliputi:
 - a. Keterampilan dalam penyusunan laporan
 - b. Kemampuan menghasilkan laporan
 - c. Memiliki keterampilan beradaptasi dalam melaksanakan pekerjaan yang sama ditempat / lingkungan kerja yang berbeda
 - d. Memiliki keterampilan intelektual, intrapersonal dan komunikasi
 - e. Memiliki keterampilan berorganisasi dan manajemen bisnis.”

Menurut Spencer & Spencer yang dikutip oleh Sudarmato (2015:53), mengatakan bahwa konsep diri (*self-concept*), watak/sifat (*traits*) dan motif kompetensi lebih tersembunyi (*hidden*), dalam (*depper*) dan berbeda pada titik sentral kepribadian seorang juga cenderung sulit untuk dikembangkan dalam program pelatihan dan pengembangan. Kompetensi pengetahuan (*knowledge competencies*) dan keahlian (*skill competencies*) cenderung lebih nyata (*visible*) dan relatif berbeda dipermukaan sebagai salah satu karakteristik yang dimiliki manusia serta mudah dikembangkan dalam program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.

Menurut Sedarmayanti (2017:286) menyatakan bahwa kompetensi terdiri dari :

1. “Pengetahuan (*Knowledge*)
Informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai bidang yang digelutinya (tertentu), misalnya bahasa komputer. Pengetahuan pegawai turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai yang mempunyai pengetahuan yang cukup dapat meningkatkan efisiensi dari perusahaan.
2. Keterampilan (*Skill*)
Suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada pegawai dengan baik dan maksimal, misalnya seorang programmer komputer. Disamping pengetahuan dan kemampuan pegawai, hal yang perlu diperhatikan adalah sikap perilaku pegawai.
3. Sikap Perilaku (*Attitude*)
Pola tingkah laku seseorang pegawai di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan pemerintahan. Apabila pegawai mempunyai sifat mendukung pencapaian organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan sebaik-baiknya. Kompetensi knowledge, skill, dan attitude cenderung lebih nyata (*Visible*) dan relatif berada di permukaan (ujung) sebagai karakteristik yang dimiliki manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan kemauan untuk melakukan sebuah tugas dengan kinerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari perusahaan.”

2.1.2 Pemahaman Teknologi Informasi

2.1.2.1 Pengertian Teknologi Informasi

Teknologi Informasi ada saat ini sangat berperan dalam mendukung kegiatan organisasi atau perusahaan agar kegiatan suatu perusahaan bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan menyimpan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipat gandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Menurut Sutarman (2012:13), definisi dari *information technology* (IT) sebagai berikut :

“Teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer.”

Menurut Tata Sutabri (2012:3), definisi teknologi informasi sebagai berikut:

“Suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.”

Williams and Sawyer, 2003 dalam Abdul Kadir (2013:2) mendefinisikan Teknologi Informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputer (*computer*) dengan jalur kecepatan komunikasi tinggi yang membawa data, suara, dan video.”

Sedangkan menurut Jogiyanto (2014:1) menyatakan, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil pengolahan data dalam bentuk yang berguna dan berarti bagi penerimanya yang menggambarkan kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

Dari beberapa definisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi berbasis komputer untuk mengolah data menjadi informasi yang berkualitas sehingga berguna untuk pengambilan keputusan. Teknologi informasi mencakup gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Komputer sebagai perangkat keras dengan software-software sebagai perangkat lunak yang berfungsi untuk sarana pengolahan maupun penyimpanan data yang nantinya dikirimkan melalui saluran telekomunikasi.

2.1.2.2 Pemahaman Teknologi Informasi

Paham menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 2006) mempunyai pengertian pandai dan memahami benar, sedangkan pemahaman adalah proses, cara perbuatan mengerti atau memahamkan. Ini berarti dapat disimpulkan bahwa orang yang memiliki pemahaman teknologi informasi adalah orang yang cerdas dan memahami atau mengerti tentang teknologi informasi.

Pemahaman akan pentingnya teknologi informasi bertujuan untuk memanfaatkan ataupun mengadopsi dalam suatu penggunaan teknologi informasi. Hasil dari data pengolahan suatu data tersebut dapat dimanfaatkan untuk bahan dalam sebuah penilaian kinerja, pedoman dalam pengambilan keputusan bagi pengguna atau dapat juga untuk mencapai sebuah efisiensi dan efektivitas kegiatan

usaha. Semakin luas pandangan terhadap bentuk penerapan atau pemahaman teknologi didalam kehidupan berbisnis akan dapat mendorong percepatan ketersediaan informasi akuntansi yaitu berupa laporan keuangan (Pratiwi, 2016).

Menurut Minarni (2014) Indikator Pemahaman Teknologi Informasi. Pengelolaan data keuangan berbasis teknologi yang didesain sedemikian rupa agar bisa menjadi sarana untuk pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan referensi, serta proses komunikasi data atau informasi keuangan. Indikator adalah sebagai berikut :

1. Komputerasi proses akuntansi merupakan sistem akuntansi dimana aplikasi yang dijalankan digunakan untuk mengolah transaksi akuntansi serta mampu menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan.
2. Pengelohan data transaksi keuangan yang digunakan harus berdasarkan *software* yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
3. Terintegrasinya pembuatan laporan akuntansi dan manajerial serta adanya output laporan akuntansi berdasarkan sistem informasi yang terintegrasi.

2.1.2.3 Tujuan dan Fungsi Teknologi Informasi

Sutarman (2012:17) mengemukakan tujuan dari teknologi informasi adalah:

1. “Untuk memecahkan masalah.
2. Untuk membuka kreativitas.
3. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan.”

Menurut Sutarman (2012:18) tentang fungsi teknologi informasi adalah :

1. “Menangkap (*Capture*)
Mengkomplikasikan catatan rinci dari aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya.
2. Mengolah (*Processing*)

Mengkompilasikan catatan rinci dari aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi, pengolahan atau pemrosesan data dapat berupa konversi (pengubahan data ke bentuk lain), analisis (analisis kondisi), perhitungan (kalkulasi), sistesis (penggabungan) segala bentuk data dan informasi.

- a. *Data processing*, memproses dan mengolah data menjadi suatu informasi
- b. *Information Processing*, suatu aktivitas komputer yang memproses dan mengolah suatu tipe atau bentuk dari informasi dan mengubahnya menjadi tipe atau bentuk informasi.
- c. *Multimedia system*, suatu sistem komputer yang dapat memproses berbagai tipe atau bentuk dari informasi secara bersamaan.

3. Menghasilkan (*Generating*)

Menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna. Misalnya : laporan, table, grafik, dan sebagainya.

4. Menyimpan (*Storage*)

Merekam atau menyimpan dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya disimpan ke *hardisk, tape, disket, compact disc (CD)* dan sebagainya.

5. Mencari kembali (*Retrieval*)

Menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau menyalin (copy) data dan informasi yang sudah tersimpan. misalnya mencari supplier yang sudah lunas.

6. Transmisi (*Transmission*)

Mengirimkan data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalnya mengirimkan data penjualan dari user A ke user lainnya.”

2.1.2.4 Peran Teknologi Informasi

Peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari sangat penting. Karena peran teknologi informasi sudah semakin pesat sehingga kebutuhan manusia akan teknologi juga semakin banyak. Salah satu saat ini yang memanfaatkan teknologi informasi adalah pemerintah. Penggunaan teknologi informasi dalam sebuah organisasi sangatlah penting. Untuk menerapkan teknologi informasi mampu meningkatkan sebuah pemerintahan, sehingga dalam penerapan teknologi informasi dibutuhkan orang yang handal yang dapat berjalan dengan baik.

Menurut Abdul Kadir (2014 :12), peranan teknologi informasi adalah :

1. “Teknologi informasi mengagantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomatis terhadap suatu tugas atau proses.
2. Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses.
3. Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknoloi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses.”

2.1.2.5 Pengelompokan Teknologi Informasi

Awalnya pengelompokan komputer dilakukan berdasarkan besarnya memori yang digunakan sebagai penyimpanan data pada komputer, tetapi pada saat ini pengelompokan komputer dilakukan berdasarkan kemampuan pengolahan data.

Menurut Haag yang dikutip oleh Abdul Kadir (2014:11) membagi teknologi informasi menjadi 6 kelompok yaitu:

1. “Teknologi masukan (*input technology*)
Segala perangkat yang digunakan untuk mengangkat data/informasi dari sumber asalnya.
2. Teknologi keluaran (*output technology*)
Supaya informasi bisa diterima oleh pemakai yang membutuhkan informasi perlu disajikan dalam monitor. Namun kadang kala pemakai menginginkan informasi yang tercetak dalam kertas (*hardcopy*). Pada keadaan seperti ini, printer berperan dalam menentukan kualitas cetakan. Terdapat berbagai peran yang mendukung penyajian informasi, termasuk dalam suara.
3. Teknologi perangkat lunak (*software technology*)
Teknologi penyimpanan menyangkut segala peralatan yang digunakan untuk menyimpan data.
4. Teknologi penyimpanan (*storage technology*)
Teknologi penyimpanan menyangkut segala peralatan yang digunakan untuk menyimpan data.
5. Teknologi komunikasi (*telecommunication technology*)
Teknologi telekomunikasi ini merupakan teknologi yang memungkinkan hubungan jarak jauh.
6. Mesin pemroses (*processing machine*)
Mesin pemroses adalah bagian penting dalam teknologi informasi yang berfungsi untuk mengingat data atau program (berupa komponen/memori) dan mengeksekusi program (berupa komponen CPU).”

2.1.2.6 Komponen Pemahaman Teknologi Informasi

Menurut Jogiyanto (2014:4) tentang dimensi dari pemahaman teknologi informasi pada komponen-komponen teknologi informasi berbasis komputer, yaitu:

1. “Perangkat Keras Komputer
Perangkat keras computer adalah alat pengolahan data yang bekerja secara elektronis dan otomatis. Sistem perangkat komputer terdiri dari empat unsur utama dan satu unsure tambahan. Keempat unsur utama itu adalah *Input unit*, *Central Processing Unit (CPU)*, *Storage/memory* dan *Output Unit*. Sedangkan yang merupakan unsur tambahan adalah *Communication Link*. Perangkat Keras Komputer meli
 - a. Alat pengelolaan data yang digunakan oleh instansi secara otomatis
 - b. Stok untuk mengganti Input unit dan Output unit yang rusak
 - c. *Storage/memory* yang dimiliki instansi untuk menyimpan dokumen
 - d. Komputer yang digunakan memberikan manfaat/kegunaan
 - e. Stok CPU untuk mengganti yang rusak
 - f. *Communication link* yang digunakan oleh instansi untuk pemakaian tertentu
2. Perangkat Lunak Komputer
Perangkat lunak komputer adalah komponen-komponen dalam sistem pengolahan data yang berupa program-program untuk mengontrol kerja sistem komputer. Pada umumnya istilah perangkat lunak berhubungan dengan cara-cara untuk menghasilkan hubungan yang lebih efisien antara manusia dan mesin komputer. Fungsi perangkat lunak komputer antara lain adalah mengidentifikasi program komputer dan menyiapkan aplikasi program komputer sehingga tata kerja seluruh peralatan komputer menjadi terkontrol serta mengatur dan membuat pekerjaan yang berkaitan dengan komputer lebih efisien.
 - a. Sistem pengelolaan data berupa program untuk mengontrol kerja sistem komputer
 - b. Aplikasi yang digunakan untuk menyiapkan program komputer
 - c. Sistem informasi (software/aplikasi) dapat disesuaikan dengan perubahan yang lingkungan yang terjadi baik internal maupun eksternal (seperti perubahan kebijakan, aturan, prosedur, dll).
 - d. Sistem yang terkomputerisasi mampu mendukung pengambilan keputusan.
 - e. Sistem informasi (software/aplikasi) memberikan kemudahan dalam pengoperasiannya
3. Data dan Komunikasi Data
Data merupakan fakta-fakta atau pengamatan-pengamatan mengenai orang, tempat, sesuatu, dan kejadian. Komunikasi data adalah suatu perkawinan antara pengolahan data dan transmisi data. Komunikasi data merupakan penggerak data dan informasi yang dikodekan dari satu titik ke titik lain

melalui peralatan listrik atau elektromagnetik kabel serat optic atau sinyal gelombang mikro.

- a. Perangkat untuk melakukan transfer data
- b. Jaringan internet untuk transfer data
- c. Jaringan nirkabel (tanpa kabel, seperti wifi) untuk transfer data.”

2.1.3 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Menurut Abdul Halim (2012:20) pengertian akuntabilitas dalam arti luas yaitu sebagai berikut:

“Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan keterangan.”

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:28) mendefinisikan akuntabilitas kinerja adalah:

“Suatu bentuk keharusan seorang (pimpinan/ pejabat/ pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan”.

Sedangkan menurut Mahmudi (2013:18) menyatakan bahwa:

“Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Menurut Mardiasmo (2018:27) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah:

“Kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

Menurut Rudi M. Harahap (2013:19) menyatakan bahwa Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah:

“Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja atas pelaksanaan keberhasilan/ kegagalan misi organisasi/ badan hukum/ pimpinan kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.”

Berdasarkan pemaparan definisi oleh para ahli diatas, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien, serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa adalah pemberian laporan dan pengungkapan dari aktivitas dan kinerja yang telah dilakukan mengenai pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa dalam satu kurun waktu tertentu kepada pihak-pihak yang berkepentingan

2.1.3.2 Jenis-Jenis Akuntabilitas

Menurut Brautinggam dalam Nizar yang dikutip Joko Widodo (2021) akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu:

1. “Akuntabilitas politik
Akuntabilitas politik berkaitan erat dengan sistem pemilu, sistem politik “multi partai” dinilai lebih mampu menjamin akuntabilitas politik pemerintahan terhadap rakyatnya daripada pemerintahan dalam sistem “satu partai”.
2. Akuntabilitas keuangan
Dalam akuntabilitas keuangan aparat pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat dalam anggaran belanjannya yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi.
3. Akuntabilitas hukum

Dalam Akuntabilitas hukum rakyat harus memiliki keyakinan bahwa unit-unit pemerintahan dapat bertanggungjawab secara hukum atas segala tindakannya.”

Menurut Samuel Paun dalam Tjahya Supriatna (2013:102), akuntabilitas dapat dibedakan atas *democratic accountability*, *professional accountability*, and *legal accountability* dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. “*Democratic Accountability*

Akuntabilitas demokratis merupakan gabungan antara *administrative* dan *politic accountability*. Menggambarkan pemerintah yang akuntabel atas kinerja dan semua kegiatannya kepada pemimpin politik. Pada negara-negara demokratis, menteri pada parlemen. Penyelenggaraan pelayanan publik akuntabel kepada menteri/pimpinan instansi masing-masing. Dalam konteks ini pelaksanaan akuntabel dilakukan secara berjenjang dari pimpinan bawah ke pimpinan tingkat tinggi secara hierarki yaitu Presiden pada MPR.

2. *Professional Accountability*

Dalam akuntabilitas profesional, pada umumnya para pakar, profesional dan teknokrat melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan norma-norma dan standar profesinya untuk menentukan public interest atau kepentingan masyarakat

3. *Legal Accountability*

Berdasarkan kategori akuntabilitas legal (hukum), pelaksana ketentuan hukum disesuaikan dengan kepentingan *public goods* dan *public service* yang merupakan tuntutan (*demand*) masyarakat (*costumer*). Dengan akuntabilitas hukum, setiap petugas pelayanan publik dapat diajukan ke pengadilan apabila mereka gagal dan bersalah dalam 25 melaksanakan tugasnya sebagaimana diharapkan masyarakat. Kesalahan dan kegagalan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat akan terlihat pada laporan akuntabilitas legal.”

Mardiasmo (2018:20) juga menyebutkan bahwa akuntabilitas publik terdiri atas dua macam berikut:

1. “Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*).

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada entitas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada DPR.

2. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*).

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan rakyat.”

Menurut Hopwood dan Tomkins (1984) dan Elwood (1993) dalam Mahmudi (2013:19) menjelaskan bahwa terdapat 5 komponen:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
2. Akuntabilitas Manajerial
3. Akuntabilitas Program
4. Akuntabilitas Kebijakan
5. Akuntabilitas Finansial.

Berikut dibawah ini merupakan penjelasan mengenai komponen akuntabilitas publik:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law of enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktik dan maladministrasi.

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas Manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif. Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau customer-nya.

Akuntabilitas manajerial merupakan akuntabilitas bawahan kepada atasan dalam suatu organisasi.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggung jawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publis untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

2.1.3.3 Komponen Akuntabilitas

Beberapa dimensi akuntabilitas publik yang harus dimiliki oleh organisasi sektor publik (Mardiasmo, 2018:28) :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan hukum
2. Akuntabilitas Proses
3. Akuntabilitas Program
4. Akuntabilitas Kebijakan

Berikut dibawah ini merupakan penjelasan mengenai indikator akuntabilitas publik:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik.

- a. Tingkat kejujuran dalam hal melakukan atau tidaknya berbagai macam penyalahgunaan wewenang
- b. Kuantitas kinerja disajikan secara terbuka dan tepat kepada masyarakat
- c. Tingkat kejujuran dalam pelaporan

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal cakupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah biaya.

- a. Kualitas keahlian dalam hal kinerja
- b. Kuantitas kesadaran dalam melaksanakan tugas sebaik mungkin

- c. Kualitas sistem yang digunakan dalam mengelola kinerja

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang mempertimbangkan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

- a. Tingkat pelaksanaan program-program penyusunan rencana dirasakan ada manfaatnya untuk meningkatkan kinerja
- b. Kualitas pembuatan laporan dalam pelaksanaan program memerlukan kompetensi yang baik
- c. Kualitas program dapat meningkatkan pemahaman

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

- a. Kualitas kebijakan dan aturan yang dibuat berguna dalam evaluasi kinerja
- b. Banyaknya kegiatan atau program yang dibayar selalu dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku
- c. Kualitas dalam pengelolaan dan perencanaan program sepenuhnya dilandaskan pada hasil musyawarah.

Sedangkan dimensi akuntabilitas menurut Mahmudi (2013:9) adalah sebagai

berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*)
Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.
2. Akuntabilitas Manajerial (*managerial accountability*)

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau *costumer*-nya.

3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan.

5. Akuntabilitas Finansial (*financial accountability*)

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*money public*) secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama publik.

2.1.3.4 Dana Desa

Kementerian Keuangan (2017), mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten.

Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dalam Muhamad Muiz (2019:10), desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendataan asli desa, bagi hasil pajak retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Kementerian Keuangan (2017) guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa itu dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Pengalokasian anggaran ini guna pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa ini meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong.

Dana desa dialokasikan untuk seluruh desa menurut Kementerian Keuangan (2017). Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan

memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesuliatan geografis. Dana desa dihitung berdasarkan proporsi dan bobot formula, yaitu :

- a. 90% Porsi yg dibagi rata (Alokasi Dasar)
- b. 10% Porsi berdasarkan formula (Alokasi Formula):
 - jumlah penduduk desa (25%),
 - angka kemiskinan desa (35%)
 - luas wilayah desa (10%)
 - tingkat kesulitan geografis desa (30%)

2.1.3.5 Asas Pengelolaan Dana Desa

Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 dalam Kementerian Keuangan (2017), keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

1. **Transparan**
Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa
2. **Akuntabel**
Akuntabel yaitu perwujudan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. **Partisipatif**
Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. **Tertib dan Disiplin Anggaran**
Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Sedangkan menurut Badiul Hadi (2020:3), Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien dilakukan

dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan desa yang baik, yaitu:

- a. **Transparan.**
Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. **Akuntabel.**
Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. **Partisipatif.**
Penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk proses perencanaan dan penganggaran desa wajib mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa, termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, pemerhati atau forum anak tingkat desa, masyarakat adat, dan kelompok sectoral, seperti kelompok tani, nelayan, dan sebagainya.
- d. **Efektif dan Efisien.**
Kegiatan yang dilaksanakan menggunakan keuangan desa harus proporsional, sesuai tingkat kewajaran, dan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang direncanakan oleh warga desa melalui Musyawarah Desa.
- e. **Tertib dan Disiplin Anggaran.**
Pengelolaan keuangan desa harus tepat waktu dan mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.1.3.6 Pengelolaan Dana Desa

Menurut Kementerian Keuangan (2017), agar terciptanya akuntabilitas maka pengelolaan dana desa seluruhnya terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

1. **Perencanaan**
 - a. Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kades dan BPD
 - b. APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan

- c. APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Raperdesa tidak sesuai
 - d. Prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes, dan unsur masyarakat
2. Pelaksanaan
- a. Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening kas desa atau sesuai ketentuan pemerintah kab/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah
 - b. Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Perdes
 - c. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dan besarnya ditetapkan dengan Perbup/Walikota
 - d. Pengadaan barang dan jasa di desa diatur dengan Perbup/Walikota
 - e. Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB dan disahkan Kepala Desa
3. Penatausahaan
- a. Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa
 - b. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran
 - c. Melakukan tutup buku setiap akhir bulan
 - d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
 - e. Laporan disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
 - f. Menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
- a. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun
 - b. Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan Perdes
 - c. Lampiran Format Laporan:
 - Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa T.A berkenaan
 - Kekayaan milik desa per 31 Desember T.A berkenaan
 - Program Pemerintah & Pemda yang masuk ke desa

2.1.3.7 Kekuasaan Pengelolaan Dana Desa

Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan

pengelolaan keuangan Desa. Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan atau otoritas dalam pengelolaan keuangan desa yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa. kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa atau PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. Oleh karena itu, kepala desa memiliki tugas dan wewenang sebagai PPKD yang diatur dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 menjelaskan sebagai berikut:

1. Wewenang Kepala Desa :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa
 - d. Menetapkan PPKD
 - e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL
 - f. Menyetujui RAK Desa
 - g. Menyetujui SPP.
2. Tugas Kepala Desa
 - a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan

- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Kepala desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dibantu atau didukung oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa atau PPKD yang berasal dari perangkat desa yang ditentukan oleh keputusan kepala desa. Perangkat desa tersebut terdiri dari :

1. Sekretaris Desa

Sekretaris desa bertugas sebagai koordinator PPKD. Sekretaris Desa mempunyai tugas :

- a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa
- b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa
- c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
- d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa
- e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD
- f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- g. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL
- h. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa

- i. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

2. Kaur dan Kasi

Kaur dan kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Kaur terdiri atas Kaur tata usaha dan umum dan Kaur perencanaan. Kasi terdiri atas Kasi pemerintahan, Kasi kesejahteraan dan Kasi pelayanan. Kaur dan Kasi mempunyai tugas :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
- b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
- c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
- d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya
- e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya
- f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

3. Kaur Keuangan

Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun RAK Desa
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan

penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

2.1.3.8 Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Kementerian Keuangan (2017), penyaluran dana desa didasarkan pada kinerja penyerapan dan capaian output serta pengalihan penyaluran melalui KPPN di daerah akan meningkatkan pelayanan dan memperkuat *governance* dan akuntabilitas dana desa.

Penyaluran dari RKUN ke RKUD dilakukan oleh Menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melalui KPPN :

1. Tahap I sebesar 60% paling cepat Maret dan paling lambat bulan Juli, dengan persyaratan :
 - a. Perda APBD
 - b. Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap desa
 - c. Laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan realisasi penyerapan DD TA sebelumnya
2. Tahap II sebesar 40% paling cepat bulan Agustus dengan persyaratan :
 - a. Laporan DD tahap I telah disalurkan ke RKD paling kurang 90%
 - b. Laporan DD tahap I telah diserap oleh desa rata-rata paling kurang 75%
 - c. Rata-rata capaian output paling kurang 50%

Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan oleh bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkan dari APBD :

1. Tahap I disalurkan 7 hari kerja setelah diterima di RKUD, dengan persyaratan:
 - a. Perdes APB Desa
 - b. Laporan realisasi penyerapan DD tahun anggaran sebelumnya
2. Tahap II disalurkan 7 hari kerja setelah diterima di RKUD, dengan persyaratan :
 - b. Laporan penyerapan DD tahap I menunjukkan rata-rata paling kurang 75%
 - c. Capaian output rata-rata paling kurang 50%

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan beberapa orang terkait penelitian ini dan menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Judul	Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa (2019)	- Muhammad Nur Aziiz, - Sawitri Dwi Prastiti	Data primer, analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan SPIP mempengaruhi akuntabilitas dana desa. Ketiga variabel tersebut memiliki sumbangan efektif terbesar hingga terkecil yaitu pemanfaatan teknologi informasi, SPIP dan kompetensi aparat desa.
Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi,	- Widia Yulianti, - Kamaliah, - Rasuli	Untuk menguji hipotesis digunakan alat analisis regresi.	a. Kompetensi aparat pengelola keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap

Sistem Akuntansi, Internal Control terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Empiris di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2018)		Uji hipotesis tersebut akan dilakukan dengan program SPSS 22.	akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa. b. Sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa. c. Internal control berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa.
Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat dan SPI terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hulu (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Siti Sarah, - Taufeni Taufik, - Devi Safitri 	Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan sumber data primer dimana data diperoleh langsung dari objek penelitian yang berupa kuesioner. Teknik analisis menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda	Kompetensi apataur, komitmen organisasi, pemnfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Nafadhila Eka - Indraswari nafadhil - Yuliasuti Rahayu 	Jenis data adalah data primer dengan teknik analisis regresi linear.	Kompetensi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan untuk pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh

terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (2021)			terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Studi pada Desa Muara Niro Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo) (2019)	- Tarjo	Teknik pengambilan sampel menggunakan simpel random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, sedangkan analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi IBM Statistik Versi 20.	<p>a. Kompetensi aparat desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dana desa di Desa Muara Niro Kabupaten Tebo. Artinya SDM yang memiliki kompetensi, maka akan semakin baik dalam mempertanggung jawabkan penggunaan dana desa.</p> <p>b. Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dana desa di Desa Muara Niro Kabupaten Tebo. Artinya SDM yang memiliki komitmen organisasi akan melaksanakan pekerjaan sebaik mungkin untuk kepentingan organisasi bukan kepentingan individu.</p> <p>c. Kompetensi aparat desa dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dana desa di Desa Muara Niro Kabupaten Tebo. Artinya bahwa SDM yang berkompeten dan</p>

			berkomitmen menjadi kunci dalam mempertanggung jawabkan dana desa untuk kepentingan masyarakat.
Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir)	<ul style="list-style-type: none"> - Ika Sasti Ferina, S.E, M.Si, Ak,CA - Drs. Burhanuddin, Macc, Ak, CA - Herman Lubis, S.E 	Jenis data adalah data primer dengan teknik analisis regresi linear.	Kesiapan Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilihat dari parameter Sumber Daya Manusia adalah belum siap. Kualitas Sumber Daya Manusia pelaksana pengelolaan keuangan desa masih belum cukup karena kurangnya sosialisasi dan minimnya pelatihan.
Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Ni Komang Ayu Julia Praba Dewi - Gayatri 	Data dikumpulkan dengan metode kuesioner. Teknik analisis data menggunakan uji regresi linear berganda.	Kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi, kepemimpinan, dan partisipasi maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin tinggi.
Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa,	<ul style="list-style-type: none"> - Sarifudin Mada, - Lintje Kalangi, 	Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif	a. Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas

<p>Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo (2017)</p>	<p>- Hendrik Gamaliel</p>	<p>metode survey. Pengumpulan data menggunakan kusioner. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS</p>	<p>pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. Artinya semakin kompeten aparat pengelola dana desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.</p> <p>b. Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. Artinya semakin tinggi komitmen pemerintah desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.</p> <p>c. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. Artinya semakin intens partisipasi masyarakat, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.</p>
<p>Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa. Partisipasi Masyarakat. Dan Pemanfaatan</p>	<p>- Khaeril Perdana</p>	<p>Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif metode survey. Pengumpulan data menggunakan kusioner. Pengujian hipotesis menggunakan</p>	<p>Bahwa kompetensi apaatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa</p>

Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul (2018)		analisis regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS	
Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Takalar (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Andi Riska Andreani Syafaruddin - Hj. Jeni Kamase - Mursalim 	Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif metode survey. Pengumpulan data menggunakan kusioner. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS	kompetensi aparatur (X1) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y). Sistem pengendalian internal (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y). Pemanfaatan teknologi informasi (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y).
Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan	- Putri Aulia	Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif metode survey. Pengumpulan data menggunakan kusioner. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS	Bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa (2018)			
Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Dwi Sapartiningsih - Suharno - Djoko Kristianto 	Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif metode survey. Pengumpulan data menggunakan kusioner. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS	Bahwa ada pengaruh yang positif signifikan anatar Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen.
Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Arif Widiyatama - Lola Novita - Diarespati 	Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif metode survey. Pengumpulan data menggunakan kusioner. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS	Kompetensi Aparatur dari Pemerintah Desa secara signifikan tidak memengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan, Sistem Pengendalian Aparatur dari Pemerintah Desa secara signifikan mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan lokasi Dana Desa (ADD).
Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan terhadap	<ul style="list-style-type: none"> - Ananda Mutiara Sweetenia - Eka Pinditya Ayu Caesari - Arum Frida Aprillia - Annisa Hakim Purwantini 	Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif metode survey. Pengumpulan data menggunakan kusioner.	Kompetensi tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan sistem pengendalian internal dan kualitas penyajian laporan keuangan

Akuntabilitas Pemerintah Desa (2019)		Penguujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS	mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.
<i>Effect Of Village Apparatus Performance, Internal Control, Information Technology Utilization On Village Fund Accountability and Implication On Quality Village Financial Reprot (2021)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Budi Hendaris, - Romli 	<i>This research type is causal research, a causal design useful for analyzing how a variable affects another variable. The data used in this study is primary data by using questionnaires as an analysis tool.</i>	Kinerja aparatur desa, pengendalian internal, teknologi informasi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan desa berada dalam kategori kinerja aparatur desa yang sangat baik, mempengaruhi tanggungjawab pengelolaan dana desa.
<i>The Effect of Community Participation, Competency of Employees, Utilization of Information Technology, and Internal Control Systems on Fund Accountability (2021)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Ni Kadek Desi Pilianti, - Ni Ketut Rasmini 	<i>This research was conducted using a quantitative approach in the form of associative research. The sampling method used was saturated samples. The method of collecting data through a questionnaire is measured with a Likert scale of 1 to 5</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Partisipasi publik memiliki efek positif pada akuntabilitas dana. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka akuntabilitas dana akan cenderung meningkat. b. Kompetensi pegawai berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana, semakin memadai kompetensi pegawai, maka akuntabilitas dana desa akan cenderung meningkat.

			<p>c. Penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana, semakin tinggi penggunaan teknologi informasi, maka akan semakin besar akuntabilitas dana desa akan cenderung meningkat.</p> <p>d. Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa, semakin efektif sistem pengendalian internal, maka akan semakin banyak akuntabilitas dana desa yang cenderung meningkat.</p>
<p><i>The Effect Of Device Competencies And Internal Control Sistem On Accountability Of Village Management</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dian Astri Budiana, - Darwis Said, - Nursini 	<p><i>This research is quantitative research, with research design hypothesis testing studies to test the influence between variables. The method of data analysis in this research is Multiple Regression Analysis. The research data was processed using Statistical Package for</i></p>	<p>a. Kompetensi perangkat desa dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi perangkat desa dalam mengelola dana desa berimplikasi pada semakin baik akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p> <p>b. Sistem pengendalian intern dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini</p>

		<i>Social Science (SPSS) version 22.</i>	menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern dalam anggaran dana desa berimplikasi pada semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa
--	--	--	--

Dari tabel penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan perbedaan yang dimiliki yaitu teknik sampling yang digunakan, dimensi pengukuran yang digunakan, variable x yang berbeda, tempat studi yang diteliti, jumlah responden, dan juga tahun penelitiannya.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi sumber daya manusia dapat membantu dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan untuk menghasilkan informasi. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkompeten maka secara otomatis terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Sehingga sumber daya manusia sangat berperan penting untuk meningkatkan akuntabilitas. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 113 dalam Kementerian Keuangan (2017) menjelaskan bahwa :

“Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur desa dan Badan Permasyarakatan Desa dan melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa tertentu upaya mendorong percepatan pembangunan perdesaan.”

Menurut Mardiasmo (2018:135) menyatakan bahwa terdapat pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sebagai berikut:

“Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kinerjanya. Sumber Daya Manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu dan terdapat pemborosan waktu serta tenaga. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan tepat waktu. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dan andal dalam hal pengambilan keputusan.”

Menurut Dewi dan Gayatri (2019) menjelaskan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kompetensi Aparat merupakan karakteristik yang harus dimiliki aparat desa dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku untuk melaksanakan fungsi atau kewenangannya. Aparat desa dengan kompetensi yang memadai akan mendukung keberhasilan pengelolaan dana desa.

Menurut Rismawati (2019) dalam penelitian Siti Sarah (2020) mengemukakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Kompetensi berpengaruh positif pada pengelolaan laporan keuangan dana desa. Aparat yang kompeten akan menghasilkan output yang baik sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Sejalan dengan teori stewardship, aparat yang bertugas sebagai pelayan memiliki kewajiban untuk melayani kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas. Sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam

penggunaan dana desa akan menghasilkan keputusan yang terbaik guna memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas yang diharapkan.

Menurut penelitian yang dilakukan Dian Astri et. al (2019) terdapat pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kompetensi perangkat desa dapat meningkatkan akuntabilitas dalam mengelola dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi perangkat desa dalam mengelola dana desa berimplikasi pada akuntabilitas pengelolaan dana desa yang lebih baik.

Penelitian Mada et al., (2017), menyatakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang berarti bahwa semakin kompeten aparat pengelola dana desa maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.

Pernyataan tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Widia Yulianti (2018), Aziiz (2019), Tarjo (2019), Siti Sarah (2020) bahwa kompetensi yang memadai dari perangkat desa dapat meningkatkan akuntabilitas yang pada akhirnya dapat membantu pemerintah desa dalam menerapkan mekanisme kontrolnya.

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat dilihat bahwa dengan kompetensi aparatur yang kompeten dapat mempermudah dalam pengelolaan dana desa sehingga aparatur desa dapat lebih memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa dengan baik serta mengurangi atau tidak ada kekeliruan dalam membuat laporan keuangan yang dibuatnya dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan dengan begitu akuntabilitas dapat dilakukan dengan optimal.

2.2.2 Pengaruh Pemahaman Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Teknologi informasi dapat membantu dalam pemrosesan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang berkualitas. Untuk memproses laporan keuangan, teknologi informasi berperan penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan pemahaman teknologi informasi yang baik maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan meningkat.

Menurut Sri Palupi (2016:66), terdapat pengaruh pemahaman teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa bahwa:

“Tujuan dikembangkannya SID (Sistem Informasi Desa) adalah meningkatkan efektivitas pelayanan publik bagi warga desa, meningkatkan kapasitas warga dalam memanfaatkan hak-haknya dan kapasitas perangkat desa dalam menjalankan kewajibannya serta memperbesar peluang warga/masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. SID juga menjadi salah satu tolak ukur akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa.”

Menurut Perdana (2018) menyatakan bahwa pemahaman teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, teknologi Informasi merupakan sekumpulan perangkat yang dapat digunakan untuk mengolah data dan menyampaikan informasi kepada masyarakat dan juga dapat mempermudah pekerjaan para aparatur dalam mengelola dana desa. Pengelolaan dana yang dilakukan oleh pemerintah harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Menurut Aulia Putri (2018) mengemukakan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Artinya semakin bagus pemanfaatan teknologi informasi, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ni Kadek Desi Pilianti dan Ni Ketut Rasmini (2021). Penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana, semakin tinggi penggunaan teknologi informasi, maka akan semakin besar akuntabilitas dana desa akan cenderung meningkat.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi dalam pemahaman teknologi informasi maka mempermudah dalam pengelolaan dana desa dan akan semakin baik sehingga akuntabilitas dapat dilakukan dengan optimal.

2.2.3 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Pemahaman Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas dapat menyampaikan gambaran dari sumber daya yang dikelola oleh pemerintah dan menjadi sebuah kontrol terhadap segala aktivitas aparatur desa dalam mengelola dana desa, sehingga peran mereka dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa sangat penting. Terciptanya akuntabilitas perlu didukung oleh faktor yang mempengaruhi.

Menurut Sri Palupi (2016:65), pengaruh kompetensi aparatur desa dan pemahaman teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:

“Desa itu sendiri berhak mendapatkan akses informasi melalui Sistem Informasi Desa. Sistem Informasi Desa merupakan perangkat yang

digunakan untuk mengelola dan menyampaikan informasi-informasi penting di desa, seperti data desa, data pembangunan desa dan kawasan perdesaan serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan tak terkecuali informasi tentang pengelolaan keuangan desa. Sistem informasi desa meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan dan sumber daya manusia.”

Menurut Pramudiarta (2015) menyatakan bahwa sumber daya manusia yang berkompeten akan dengan mudah memahami teknologi informasi sehingga akan sangat membantu dalam proses akuntansi dan dapat mengurangi kesalahan dalam pemrosesan data, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal.

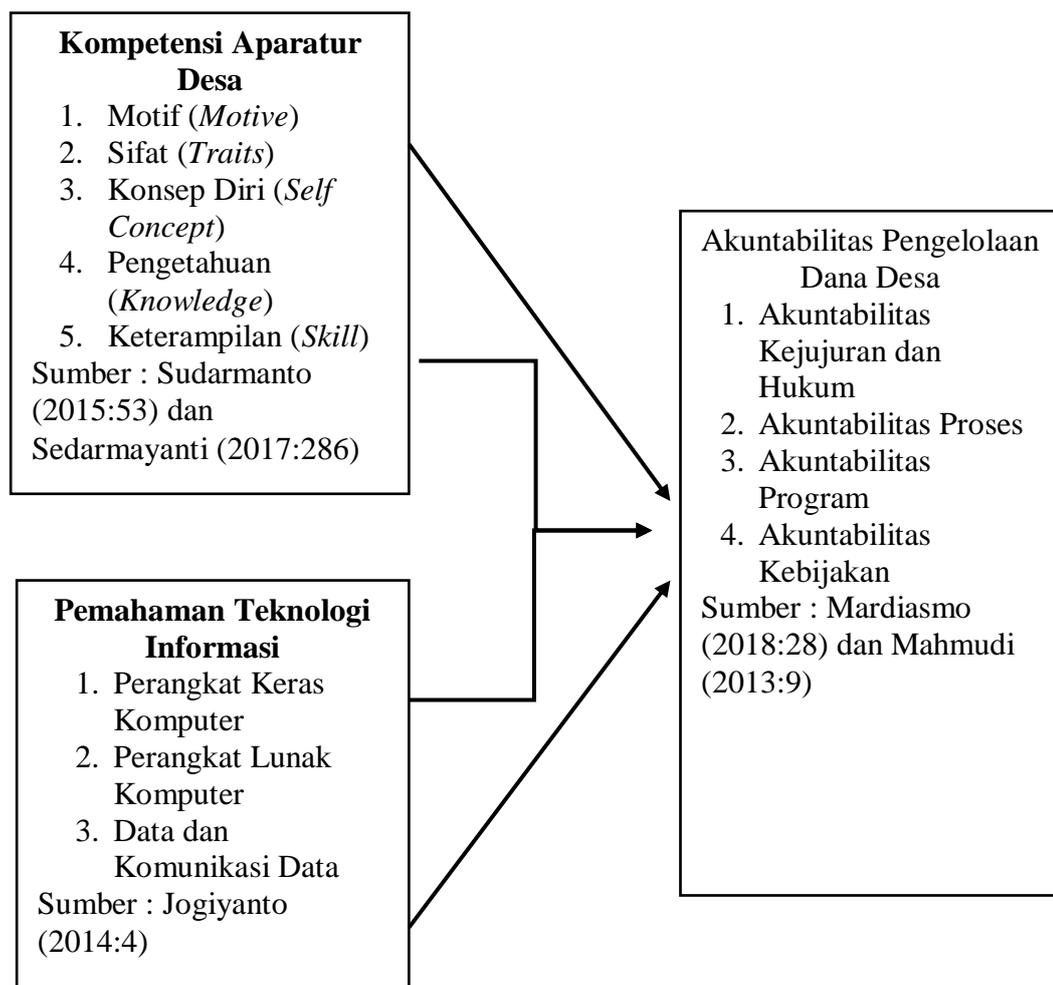
Akuntabilitas tidak tercapai jika faktor yang mempengaruhi tidak berhubungan. Faktor yang mempengaruhi ini yaitu adanya keterkaitan antara kompetensi aparat desa dengan teknologi informasi, pendapat ini menurut hasil penelitian Dwi Sapartiningsih (2018), menyatakan pengelolaan akuntabilitas dana desa diperlukan adanya kompetensi aparatur desa yang berkualitas. Selain itu, teknologi informasi dapat membantu aparatur desa dalam mengelola dana desa. Serta pengawasan yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Siti Sarah (2020), Budi Hendaris (2021) dan Ni Kadek Desi Pilianti (2021) menemukan bahwa kompetensi aparatur desa dan pemahaman teknologi informasi secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan juga didasari oleh penelitian terdahulu, penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian replika dari penelitian-penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk memberikan bukti empiris

mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa dan pemahaman teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Maka dapat digambarkan alur hubungan antar variabel yang diteliti kedalam kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2014:64) berpendapat bahwa yang dimaksud hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.”

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas telah diuraikan, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa

H2 : Pemahaman Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa

H3 : Kompetensi Aparatur Desa dan Pemahaman Teknologi Informasi
berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode penelitian merupakan suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, menyimpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang diperoleh.

Metode penelitian menurut Sugiyono (2019:2) adalah sebagai berikut:

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”

Dalam melakukan penelitian perlu adanya suatu metode, cara atau taktik sebagai langkah yang harus ditempuh oleh peneliti dalam memecahkan suatu permasalahan untuk mencapai tujuan. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey.

Menurut Sugiyono (2019:16), menyatakan bahwa pengertian metode kuantitatif adalah sebagai berikut:

“Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 70 instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”

Penelitian survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, wawancara terstruktur, dan sebagainya.

Menurut Sugiyono (2019:15) menjelaskan bahwa pengertian penelitian survey adalah sebagai berikut:

“Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditentukan kejadian-kejadian relative distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis.”

Pada penelitian ini, survey yang dilakukan penulis adalah langsung pada desa di Kabupaten Subang untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan uji statistik agar ditemukan fakta-fakta dari setiap variabel yang diteliti dan diketahui pengaruhnya antara variabel bebas dengan variabel terikat.

3.1.2 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan objek yang akan diteliti, yang dianalisis dan dikaji. Menurut Sugiyono (2019:5) menjelaskan tentang pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut:

“Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliable tentang sesuatu hal (variable tertentu).”

Menurut Sunyoto (2013:19) mengenai pentingnya objek penelitian adalah:

“Objek penelitian menjadi sangat penting dalam sebuah penelitian. Hal ini berhubungan dengan judul penelitian dan data yang diperlukan. Jika

penentuan objek penelitian ternyata tidak mendukung judul dan data penelitian, tentu saja merupakan kendala besar dan mempengaruhi hasil penelitian.”

Objek dalam penelitian ini adalah kompetensi aparatur desa, pemahaman teknologi informasi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Subang.

3.1.3 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif, dimana dalam penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan dan juga menginterpretasikan pengaruh antara variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta hubungan antara variabel yang diteliti.

Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2019:64) adalah sebagai berikut:

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik yang hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan menghubungkan dengan variabel lain (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen, karena variabel independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen).”

Penggunaan metode deskriptif digunakan untuk dapat mengetahui nilai dari kompetensi aparatur desa, pemahaman teknologi informasi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Subang

Sedangkan metode verifikatif menurut Nazir, Moch (2011:91) adalah sebagai berikut:

“Penelitian verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis melalui suatu perhitungan statistik sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima.”

Dalam Penelitian ini, metode verifikatif digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi aparatur desa, pemahaman teknologi informasi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui perhitungan statistik dan apakah hipotesisnya diterima atau ditolak.

3.1.4 Instrument Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian. Instrumen penelitian memiliki peranan serta kegunaan yang sangat penting dikarenakan bila kita tidak mempunyai instrumen dalam mendapatkan data penelitian, maka dapat mengakibatkan kita salah dalam mengambil kesimpulan dalam penelitian serta mengalami kesulitan dalam melakukan pengelompokan dan pengolahan data yang relevan dalam penelitian tersebut.

Pengertian instrumen penelitian menurut Sugiyono (2019:145) adalah sebagai berikut:

“Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Tujuannya untuk menghasilkan data kuantitatif yang akurat.”

Instrumen penelitian digunakan sebagai alat pengumpulan data, dan instrument yang lazim digunakan dalam penelitian adalah beberapa daftar pertanyaan serta kuesioner yang disampaikan dan diberikan kepada masing-masing

responden yang menjadi sampel dalam penelitian pada saat observasi dan wawancara.

Dalam penelitian ini, fenomena sosial telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut variabel penelitian dan dalam operasionalisasi variabel menggunakan skala ordinal. Skala ordinal digunakan untuk memberikan informasi nilai pada jawaban. Setiap variabel penelitian diukur dengan menggunakan instrumen pengukur dalam bentuk kuesioner berskala ordinal yang memenuhi pernyataan-pernyataan tipe Skala Likert's.

Dimana menurut Sugiyono (2019:146) menjelaskan tentang Skala Likert adalah sebagai berikut:

“Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.”

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

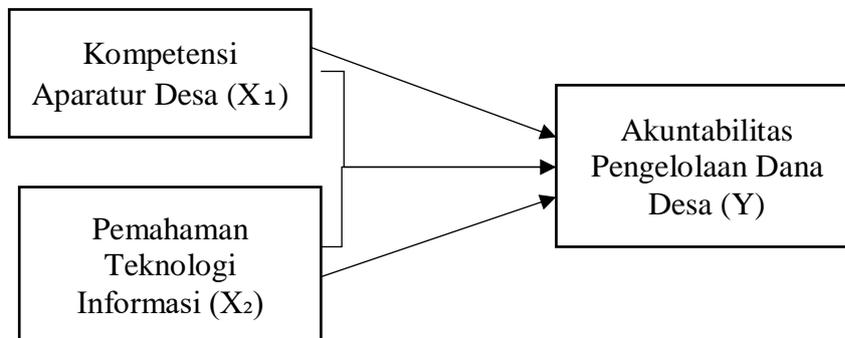
- a. Instrumen untuk mengukur pengaruh kompetensi aparatur desa, pemahaman teknologi informasi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah dengan menggunakan observasi, wawancara dan kuesioner metode tertutup, dimana kemungkinan pilihan jawaban sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberikan alternatif jawaban lain.
- b. Indikator-indikator untuk variabel-variabel tersebut kemudian dijabarkan oleh penulis menjadi sejumlah pertanyaan-pertanyaan sehingga diperoleh data kualitatif. Data ini akan dianalisis dengan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik.

3.1.5 Unit Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menentukan unit penelitian yang akan dilakukan pada aparatur desa di Kabupaten Subang yang berhubungan dan adanya keterkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3.1.6 Model Penelitian

Model penelitian merupakan model abstraksi dari fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal ini sesuai dengan judul skripsi yakni, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Pemahaman Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Maka model penelitian yang digunakan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1
Model Penelitian

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kompetensi Aparatur Desa (X1) dan Pemahaman Teknologi Informasi (X2), sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y), maka hubungan dari variable-variabel tersebut dapat digambarkan secara sistematis sebagai berikut :

$$y = f(x_1, x_2)$$

Keterangan :

Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

f : Fungsi

X₁ : Kompetensi Aparatur Desa

X₂ : Pemahaman Teknologi Informasi

Dari pemodelan diatas dapat dilihat bahwa kompetensi aparatur desa dan pemahaman teknologi informasi masing-masing dan secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3.2 Definisi dan Operasional Variabel Penelitian

3.2.1 Definisi Variabel Penelitian

Menurut Sunyoto (2013:23) yang dimaksud dengan variabel penelitian adalah sebagai berikut:

“Variabel penelitian merupakan petunjuk untuk mencari data maupun segala informasi dilapangan, baik dengan menggunakan data sekunder, observasi maupun pengumpulan data primer dengan metode survey.”

Menurut Sugiyono (2019:68), menjelaskan tentang definisi variabel penelitian adalah sebagai berikut :

“Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Variabel- variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Bebas (Variabel Independen)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2019:69) yang menjadi variabel bebas (variabel independen) (X) dalam penelitian ini adalah :

a. Kompetensi Aparatur Desa (X_1)

Definisi kompetensi aparatur desa menurut Sedarmayanti (2017:236) menyatakan bahwa :

“Kompetensi aparatur adalah kompetensi yang merujuk pada pendekatan perilaku, perilaku tertentu atau tipe dan tingkat perilaku yang berbeda yang dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil dan unggul/superior”

Menurut Sudarmanto (2015:46) menyatakan bahwa Kompetensi yaitu:

“Kompetensi sebagai atribut kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap kinerja individu. Merupakan karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi.”

b. Pemahaman Teknologi Informasi (X_2)

Definisi pemahaman teknologi informasi, menurut Jogiyanto (2014:1) informasi dapat didefinisikan :

“Sebagai hasil pengolahan data dalam bentuk yang berguna dan berarti bagi penerimanya yang menggambarkan kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan.”

Kadir dan Triwahyuni (2013:10), definsi teknologi informasi adalah:

“Teknologi informasi adalah suatu penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja termasuk kata-kata, bilangan dan gambar.”

2. Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Menurut Sugiyono (2019:69), definisi variabel terikat adalah Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas yang menjadi variabel terikat”. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah :

a. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Definisi akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa menurut Rudi M. Harahap (2013:19) menyatakan bahwa Akuntabilitas :

“Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja atas pelaksanaan keberhasilan/ kegagalan misi organisasi/ badan hukum/ pimpinan kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.”

3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi yang dipilih tentang Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Pemahaman Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, maka terdapat tiga variabel penelitian yaitu :

1. Kompetensi Aparatur Desa (X_1)
2. Pemahaman Teknologi Informasi (X_2)
3. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Berikut adalah tabel dari operasionalisasi variabel independen dan dependen.

Tabel 3.1
Operasional Variabel Independen
Kompetensi Aparatur (X₁)

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Item	Skala
<p>Kompetensi aparatur adalah kompetensi yang merujuk pada pendekatan perilaku, perilaku tertentu atau tipe dan tingkat perilaku yang berbeda yang dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil dan unggul/superior.</p> <p>Sumber: Sedarmayanti (2017:236)</p>	1. Motif (<i>Motive</i>)	<p>a. Keinginan untuk menyelesaikan suatu tugas secara tepat waktu</p> <p>b. Keinginan untuk meningkatkan kinerja dan prestasi</p> <p>c. Keinginan untuk meningkatkan kompetensi mengenai pengelolaan keuangan/dana</p>	1-3	Ordinal
	2. Sifat (<i>Traits</i>)	<p>d. Berani ikut serta dalam pengambilan keputusan</p> <p>e. Mengikuti aturan sistem dan standar pengelolaan keuangan yang ada</p> <p>f. Mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku</p>	4-6	Ordinal
	3. Konsep Diri (<i>Self Concept</i>)	<p>c. Memiliki sikap profesional dalam melaksanakan pekerjaan</p> <p>d. Melakukan pengembangan diri secara terus menerus</p>	7-9	Ordinal

		e. Mengikuti/Melaksanakan pekerjaan secara mandiri		
	4. Pengetahuan (<i>Knowledge</i>)	a. Memahami Peraturan yang ada tentang pengelolaan keuangan b. Mengetahui mengenai prosedur prosedur pengelolaan keuangan c. Mengetahui perkembangan mengenai standar akuntansi pemerintah yang berlaku	10- 12	Ordinal
	5. Keterampilan (<i>Skill</i>) Sumber : Sudarman to (2015:53) dan Sedarmay anti (2017:286)	f. Keterampilan dalam penyusunan laporan keuangan g. Kemampuan menghasilkan jurnal yang diposting kedalam buku besar dan buku pembantu h. Memiliki keterampilan beradaptasi dalam melaksanakan pekerjaan yang sama ditempat / lingkungan kerja yang berbeda i. Memiliki keterampilan intelektual, intrapersonal dan komunikasi	13- 17	Ordinal

		j. Memiliki keterampilan berorganisasi dan manajemen bisnis		
--	--	---	--	--

Tabel 3.2
Operasional Variabel Independen
Pemahaman Teknologi Informasi (X₂)

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Item	Skala
<p>Teknologi informasi adalah suatu penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja termasuk kata-kata, bilangan dan gambar.</p> <p>Sumber : Kadir dan Triwahyuni (2013:10)</p>	1. Perangkat Keras Komputer (<i>Hardware</i>)	<p>g. Banyaknya alat pengelolaan data yang digunakan oleh instansi secara otomatis</p> <p>h. Banyaknya stok untuk mengganti Input unit dan Output unit yang rusak</p> <p>i. Banyaknya Storage/memory yang dimiliki instansi untuk menyimpan dokumen</p> <p>j. Komputer yang digunakan memberikan manfaat/kegunaan</p> <p>k. Banyaknya stok CPU untuk</p>	1-6	Ordinal

		<p>mengganti yang rusak</p> <p>l. Banyaknya Communication link yang digunakan oleh instansi untuk pemakaian tertentu</p>		
	<p>2. Perangkat Lunak Komputer (<i>Software</i>)</p>	<p>f. Memiliki kemampuan dalam sistem pengelolaan data berupa program untuk mengontrol kerja sistem komputer</p> <p>g. Banyaknya aplikasi yang digunakan untuk menyiapkan program komputer</p> <p>h. Sistem informasi (software/aplikasi) dapat disesuaikan dengan perubahan yang lingkungan yang terjadi baik internal maupun eksternal (seperti perubahan kebijakan, aturan, prosedur, dll).</p>	7-11	Ordinal

		<p>i. Sistem yang terkomputerisasi mampu mendukung pengambilan keputusan.</p> <p>j. Sistem informasi (software/aplikasi) memberikan kemudahan dalam pengoperasiannya.</p>		
	<p>3. Data dan komunikasi data</p> <p>Sumber: Jogiyanto (2014:4)</p>	<p>d. Menggunakan sebuah perangkat untuk melakukan transfer data</p> <p>e. Menggunakan jaringan internet untuk transfer data</p> <p>f. Menggunakan jaringan nirkabel (tanpa kabel, seperti wifi) untuk transfer data</p>	12-14	Ordinal

Tabel 3.3
Operasional Variabel Dependen
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Item	Skala
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban untuk memberikan	1. Kejujuran dan Hukum	d. Tingkat kejujuran perangkat desa dalam hal	1-3	Ordinal

<p>pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja atas pelaksanaan keberhasilan/ kegagalan misi organisasi/ badan hukum/ pimpinan kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.</p> <p>Sumber : Rudi M. Harahap (2013:19)</p>		<p>melakukan atau tidaknya berbagai macam penyalahgunaan wewenang</p> <p>e. Kuantitas pengelolaan dana desa disajikan secara terbuka dan tepat kepada masyarakat</p> <p>f. Tingkat kejujuran perangkat desa dalam pelaporan keuangan dana desa</p>		
	2. Proses	<p>d. Kualitas perangkat desa memiliki keahlian dalam hal pengelolaan dana desa</p> <p>e. Kuantitas kesadaran perangkat desa dalam melaksanakan tugas sebaik mungkin</p>	4-6	Ordinal

		f. Kualitas sistem akuntansi dan sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan dana desa		
	3. Program	d. Tingkat pelaksanaan program-program penyusunan anggaran dirasakan ada manfaatnya oleh perangkat desa untuk meningkatkan kinerja e. Kualitas pembuatan laporan dalam pelaksanaan program desa memerlukan kompetensi aparatur yang baik f. Kualitas program dana dapat	7-9	Ordinal

		meningkatkan pemahaman mengenai teknologi informasi		
	4. Kebijakan	<p>d. Kualitas kebijakan dan aturan yang dibuat oleh pemerintah berguna dalam evaluasi kinerja bagi perangkat desa</p> <p>e. Banyaknya kegiatan atau program yang dibayar oleh dana desa selalu dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku</p> <p>f. Kualitas dalam pengelolaan dan perencanaan program dana desa sepenuhnya dilandaskan pada hasil musyawarah</p>	10-12	Ordinal
	<p>Sumber: Mardiasmo (2018:28) dan Mahmudi (2013:9)</p>			

		perangkat dan masyarakat desa		
--	--	-------------------------------	--	--

3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2019:126) menjelaskan bahwa pengertian populasi adalah sebagai berikut :

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Populasi dalam penelitian ini adalah subyek yang berhubungan dengan Kompetensi Aparatur Desa, Pemahaman Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa yaitu desa-desa di Kabupaten Subang yang berjumlah 245 desa.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2019:127) menyatakan bahwa pengertian sampel adalah sebagai berikut :

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Dan untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus representatif (mewakili).”

Penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi responden maka jumlah responden setiap desanya yaitu sebanyak 3 orang. Responden yang berkaitan

dengan Kompetensi Aparatur Desa, Pemahaman Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa yaitu kepala desa, sekretaris desa dan bendahara.

Dikarenakan jumlah populasi yang sangat banyak yaitu 245 (lebih dari 100), Maka peneliti mengambil sampel yang benar-benar representatif (dapat mewakili). Untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dari populasi peneliti menggunakan persentase sebagaimana pada tabel *persentase sampling* yang dikemukakan Yount (1999) dalam Hertanto (2015:7).

Tabel 3.4
Persentase Sampling

Besarnya Populasi	Besar Sampel
0-100	100%
101-1000	10%
1001-5000	5%
5001-10000	3%
>10000	1%

Penentuan sampel berdasarkan tabel persentase sampling menurut Yount di atas menunjukkan penelitian ini masuk dalam kategori jumlah populasi 101-1000 sehingga jumlah sampel adalah 10% dari besarnya populasi desa yang ada di Kabupaten Subang dengan jumlah 245 desa yaitu menjadi 25 sampel desa.

Tabel 3.5
Sampel Penelitian

Desa Tambakmekar	Desa Kumpay	Desa Bunihayu	Desa Palasari	Desa Jalancagak
Desa Tambakan	Desa Gunungtua	Desa Tanjungwangi	Desa Sumur Barang	Desa Sadawarna

Desa Padaasih	Desa Cibalandong Jaya	Desa Cinangsi	Desa Cisaga	Desa Belendung
Desa Majasari	Desa Cibogo	Desa Gunungsari	Desa Sukamulya	Desa Kamarung
Desa Pagaden	Desa Sukasari Dawuan	Desa Rawalele Dawuan	Desa Dawuan Kidul	Desa Dawuan Kaler

3.3.3 Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling*. Menurut Sugiyono (2018:118) definisi *probability sampling* adalah:

“Teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.”

Dengan teknik yang diambil yaitu *Simple Random Sampling*. Menurut Sugiyono (2019:129) teknik *Simple Random Sampling* adalah:

“Pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen.”

Maka dari itu, penulis memilih sampel menggunakan teknik *Simple Random Sampling* yang berarti sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 25 desa dengan 3 responden setiap desanya.

3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Sumber Data

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data yang relevan, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung secara empiris kepada pelaku atau yang terlibat langsung, dengan menggunakan teknik pengumpulan data tertentu.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau hasil penelitian pihak lain.

Dalam penelitian ini data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder, dimana data primer tersebut bersumber dari hasil pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner kepada responden perangkat desa yang ada di Kabupaten Subang. Sedangkan data sekunder bersumber dari studi kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari serta menganalisa berbagai literatur seperti penelitin sebelumnya, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan paling strategis dalam penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang

ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yang berkaitan dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dalam penelitian ini dikaitkan dengan jenis data primer. Untuk memperoleh data serta hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kepada responden untuk dijawab dan kemudian diambil hasilnya untuk keperluan data penelitian.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah penelitian yang berkaitan dengan jenis data sekunder. Studi kepustakaan ini sebagai faktor penunjang untuk memperoleh landasan teoritis, dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari serta menganalisa berbagai literatur seperti jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.5 Metode Analisa Data

Setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik pengolahan data.

Analisis data merupakan penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dipahami, dibaca dan diinterpretasikan.

Menurut Sugiyono (2019:206) pengertian analisis data adalah:

“Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.”

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tercantum dalam rumusan masalah. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, maka digunakan metode statistik yang merupakan metode analisis data yang efektif dan efisien dalam suatu penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis statistik dengan menggunakan software IBM SPSS Statistics.

3.5.1 Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2019:357) menjelaskan tentang analisis deskriptif sebagai berikut:

"Analisis deskriptif adalah analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”

Analisis deskriptif dalam penelitian pada dasarnya mengemukakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel populasi.

Sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden. Setelah adanya analisis data antara data di lapangan kemudian diadakan perhitungan hasil kuesioner agar hasil analisis dapat teruji dan dapat diandalkan. Setiap masing-masing item dari kuesioner memiliki nilai yang berbeda, yaitu:

Tabel 3.6
Skala Model Likert

Alternatif Jawaban	Bobo Nilai
Selalu	5
Sering	4
Kadang – kadang	3
Jarang	2
Tidak Pernah	1

Sumber : Sugiyono (2019:147)

Apabila data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, disajikan dan dianalisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji statistik. Untuk menilai variabel independen (X) dan variabel dependen (Y), maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata (mean) dari masing-masing variabel. Nilai rata-rata (mean) ini diperoleh dengan menjumlahkan data keseluruhan dalam setiap variabel, kemudian dibagi dengan jumlah responden. Untuk rumus rata-rata digunakan sebagai berikut:

Untuk Variabel X

$$Me = \frac{\sum xi}{n}$$

Untuk Variabel Y

$$Me = \frac{\sum yi}{n}$$

Keterangan :

Me = Rata- rata

$\sum x_i$ = Jumlah nilai x ke-i sampai ke-n

$\sum y_i$ = Jumlah nilai y ke-i sampai ke-n

n = Jumlah Responden

Setelah diperoleh rata-rata dari masing-masing variabel kemudian dibandingkan dengan kriteria yang peneliti tentukan berdasarkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari hasil kuesioner. Nilai terendah dan nilai tertinggi itu masing-masing peneliti ambil dari banyaknya pertanyaan dalam kuesioner dikalikan dengan nilai terendah (1) dan nilai tertinggi (5) yang telah ditetapkan.

Berdasarkan nilai tertinggi dan nilai terendah tersebut maka dapat ditentukan rentang interval yaitu nilai tertinggi dikurang nilai terendah, sedangkan menghitung panjang kelas dengan cara rentang interval dibagi dengan jumlah kelas.

- a. Untuk variabel independen (X_1) Kompetensi Aparatur Desa dengan 17 pertanyaan, nilai tertinggi dikalikan dengan 5 dan nilai terendah dikalikan dengan 1, sehingga:

- Nilai tertinggi $17 \times 5 = 85$

- Nilai terendah $17 \times 1 = 17$

Lalu kelas interval sebesar $\frac{85-17}{5} = 13,6$ maka penulis menentukan kriterianya sebagai berikut:

Tabel 3.7
Kategorisasi Kompetensi Aparatur Desa

Nilai	Kriteria
17 – 30,6	Tidak Kompeten
30,6 – 44,2	Kurang Kompeten
44,2 – 57,8	Cukup Kompeten
57,8 – 71,4	Kompeten
71,4 - 85	Sangat Kompeten

b. Untuk variabel independen (X_2) Pemahaman Teknologi Informasi dengan 14 pertanyaan, nilai tertinggi dikalikan dengan 5 dan nilai terendah dikalikan dengan 1, sehingga:

- Nilai tertinggi $14 \times 5 = 70$
- Nilai terendah $14 \times 1 = 14$

Lalu kelas interval sebesar $\frac{70-14}{5} = 11,2$ maka penulis menentukan

kriterianya sebagai berikut:

Tabel 3.8
Kategorisasi Pemahaman Teknologi Informasi

Nilai	Kriteria
14 – 25,2	Tidak Optimal
25,2 – 36,4	Kurang Optimal
36,4 – 47,6	Cukup Optimal
47,6 – 58,8	Optimal
58,8 - 70	Sangat Optimal

c. Untuk variabel dependen (Y) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan 8 pertanyaan, nilai tertinggi dikalikan dengan 5 dan nilai terendah dikalikan dengan 1, sehingga:

- Nilai tertinggi $12 \times 5 = 60$
- Nilai terendah $12 \times 1 = 12$

Lalu kelas interval sebesar $\frac{60-12}{5} = 9,6$ maka penulis menentukan

kriterianya sebagai berikut:

Tabel 3.9
Kategorisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Nilai	Kriteria
12 – 21,6	Tidak Akuntabel
21,6 – 31,2	Kurang Akuntabel
31,2 – 40,8	Cukup Akuntabel
40,8 – 50,4	Akuntabel
50,4 - 60	Sangat Akuntabel

3.6 Pengujian Validitas dan Reabilitas Instrumen

3.6.1 Uji Validitas Instrumen

Suatu instrumen dapat dinyatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat sehingga data tersebut dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan kenyataan. Pengujian validitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana tingkat validitas instrumen yang digunakan (kuesioner). Suatu alat ukur yang validitasnya tinggi

akan mempunyai tingkat kesalahan kecil, sehingga data yang terkumpul merupakan data yang memadai.

Menurut Sugiyono (2019:175) menyatakan bahwa instrument yang valid adalah sebagai berikut:

“Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.”

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah dari tiap skor butir. Jika ada item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut. Syarat tersebut menurut sugiyono (2019:183) yang harus dipenuhi yaitu harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- d. Jika koefisien korelasi $r > 0,30$ maka item tersebut dinyatakan valid
- e. Jika koefisien korelasi $r < 0,30$ maka item tersebut dinyatakan tidak valid

Untuk menghitung korelasi pada uji validitas menggunakan korelasi *Pearson Product Moment* yang dirumuskan sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n\sum x^2 - (\sum x)^2) - (n\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan :

r_{xy} = Koefisien Korelasi Product Moment

n = Jumlah responden

$\sum x$ = Jumlah nilai variabel independen (variabel bebas)

$\sum y$ = Jumlah nilai variabel dependen (variabel terikat)

$\sum x^2$ = Jumlah pangkat dua nilai variabel X

Σy^2 = Jumlah pangkat dua nilai variabel Y

Σxy = Jumlah perkalian variabel independen dan variabel dependen

3.6.2 Uji Reabilitas Instrumen

Sebuah alat ukur atau pertanyaan dalam kuesioner dikategorikan reliable (andal), jika alat ukur yang digunakan dapat mengukur secara konsisten atau stabil meskipun pertanyaan tersebut diajukan dalam waktu yang berbeda. Uji reliabilitas dilakukan terhadap butir pertanyaan atau pernyataan yang sudah valid. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama.

Menurut Sugiyono (2019:173) menyatakan bahwa:

“Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi data dalam interval waktu tertentu. Penggunaan pengujian reliabilitas oleh peneliti adalah untuk menilai konsistensi pada objek dan data, apakah instrument yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama.”

Uji reabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Internal Consistency dengan menggunakan koefisien *cronbach alpha* (α) dengan menggunakan fasilitas SPSS untuk jenis pengukuran interval. Koefisien *cronbach alpha* (α) yang paling sering digunakan karena koefisien ini menggunakan variasi dari item baik untuk format benar atau salah atau bukan, seperti format pada skala likert. Sehingga koefisien *alpha cronback* (α) merupakan koefisien yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi internal *consistency*.

Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha*:

1. *cronbach alpha* < 0,60, maka reliabilitas dikatakan buruk.
2. *cronbach alpha* 0,60 – 0,79, maka reliabilitas dikatakan cukup.
3. *cronbach alpha* > 0,80 maka reliabilitas dikatakan baik

Uji Reliabilitas Jika nilai cronbach's alpha > 0,60 maka kuesioner atau angket dinyatakan reliabel atau konsisten dan jika nilai cronbach's alpha < 0,60 maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten.

Adapun rumus *Cronbach Alpha* adalah sebagai berikut:

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum si}{st} \right)$$

Keterangan :

α = Koefisien reliabilitas

k = Jumlah item pertanyaan yang diuji

$\sum Si$ = Jumlah varian skor tiap item

St = Varian total

3.7 Metode Transformasi Data

Data pada penelitian ini diperoleh dari jawaban kuesioner pada responden yang menggunakan skala likert, dari skala pengukuran likert tersebut maka akan diperoleh data ordinal. Untuk memenuhi persyaratan data untuk keperluan analisis regresi yang mengharuskan skala pengukuran data minimal skala interval, maka data yang berskala ordinal tersebut harus ditransformasi terlebih dahulu ke dalam skala interval. Teknik transformasi yang paling sederhana dengan menggunakan *Method of Succesive Interval* (MSI) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperhatikan setiap butir jawaban responden dari kuesioner yang disebarkan
2. Untuk setiap butir pertanyaan tentukan frekuensi (f) responden yang menjawab skor 1, 2, 3, 4, 5 untuk setiap item pertanyaan
3. Menentukan proporsi setiap responden, yaitu dengan cara membagi frekuensi dengan jumlah sampel
4. Menentukan frekuensi secara berurutan untuk setiap responden sehingga diperoleh proporsi kumulatif
5. Menentukan nilai Z untuk masing-masing proporsi kumulatif yang dianggap menyebar mengikuti sebaran normal baku
6. Menghitung nilai skala (Scale Value = SV) untuk masing-masing responden dengan menggunakan rumus:

$$\text{Scale value} = \frac{\text{Density at Lower Limit} - \text{Density at Upper Limit}}{\text{Area below upper limit} - \text{area below lower limit}}$$

Keterangan:

Density at Lower Limit = Nilai Densitas Bawah Limit

Density at Upper Limit = Nilai Densitas Bawah Atas

Area below Upper Limit = Daerah dibawah Batas Atas

Area below Lower Limit = Daerah dibawah Batas Bawah

7. Melakukan transformasi nilai skala dari nilai skala ordinal ke nilai skala interval. Mengubah *Scale Value* (SV) terkecil menjadi sama dengan satu dan mentransformasikan masing-masing skal menurut perubahan skala terkecil sehingga diperoleh *Transformed Scale Value* (TSV).

Untuk menentukan nilai transformasi terdapat rumus sebagai berikut:

$$\textit{Transformed Scala Value} = Y = SV + [SVmin] + 1$$

3.8 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan beberapa pengujian yang mendasari penggunaan analisis korelasi dan berganda, hal tersebut untuk menguji apakah model yang digunakan tersebut mewakili atau mendekati kenyataan yang ada. Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, maka harus terlebih dahulu memenuhi uji asumsi klasik. Terdapat empat jenis pengujian pada uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Uji Normalitas, Multikolinieritas, Autokorelasi, dan Heteroskedastisitas.

3.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sampel yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai *error* (ϵ) yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas data menggunakan *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov* dalam program SPSS.

Menurut Singgih Santoso (2012:393) dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*, *Exact Significance* dan *Monte Carlo Significance*), yaitu:

1. Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model adalah normal

2. Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal

3.8.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah hubungan linier sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel independen dari model regresi. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi diantara variabel independen pada sebuah model regresi. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika terbukti ada multikolinieritas, sebaiknya salah satu dari variabel independen yang ada dikeluarkan dari model, lalu pembuatan model regresi diulang kembali (Singgih Santoso, 2012:234).

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah mempunyai angka *tolerance* mendekati 1. Batas VIF adalah 10, jika nilai VIF dibawah 10, maka tidak terjadi gejala multikolinieritas (Gujarati, 2012:432)

Menurut Singgih Santoso (2012:236) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$VIF = \frac{1}{Tolerance} \text{ atau } Tolerance = \frac{1}{VIF}$$

3.8.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian atau residual atau pengamatan ke pengamatan lainnya. Menurut Gujarat (2012:406) untuk menguji data ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji *rank-spearman* yaitu dengan mengkorelasikan variabel independen terhadap nilai absolute dari residual (*error*). Untuk mendeteksi gejala uji heteroskedastisitas, maka dibuat persamaan regresi dengan asumsi tidak ada heteroskedastisitas kemudian menentukan nilai *absolute residual* diperoleh sebagai variabel dependen serta dilakukan regresi dari variabel independen. Jika nilai koefisien korelasi antara variabel independen dengan nilai absolute dari residual signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (varian dari residual tidak homogen).

3.9 Analisis Kolerasi dan Regresi

3.9.1 Analisis Kolerasi Berganda

Analisis korelasi berganda dapat digunakan untuk mengetahui besarnya atau kekuatan hubungan antara seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersamaan.

Menurut Sugiyono (2019:257) rumus koefisien korelasi sebagai berikut:

$$R_{yx_1x_2} = \sqrt{\frac{r_{yx_1}^2 + r_{yx_2}^2 + 2r_{yx_1}r_{yx_2}r_{x_1x_2}}{1 - r_{x_1x_2}^2}}$$

Keterangan :

$R_{yx_1x_2}$ = Korelasi antara variabel X1 dengan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y

r_{yx1^2} = Korelasi Product Moment antara X1 dengan Y

r_{yx2^2} = Korelasi Product Moment antara X2 dengan Y

$r_{x_1x_2}$ = Korelasi Product Moment antara X1 dengan X2

Sebagai bahan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan berikut ini:

Tabel 3.10
Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Lemah
0,20 – 0,399	Lemah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,899	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono, 2019

3.9.2 Analisis Regresi Berganda

Karena dalam penelitian ini terdapat lebih dari satu variabel bebas yang akan diuji untuk mengetahui terhadap variabel terikat, maka proses regresi yang dilakukan adalah menggunakan analisis regresi berganda.

Menurut Sugiyono (2019:277) mendefinisikan analisis regresi sebagai berikut :

“Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium) bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasinya (dinaik-turunkannya).”

Adapun persamaan regresi berganda untuk dua prediktor yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

α = Harga Y bila X=0 (koefisien konstanta)

$\beta_1 \beta_2$ = Koefisien regresi

X1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia

X2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

e = Tingkat kesalahan / Pengaruh faktor lain

3.10 Rancangan Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Sebagaimana pengertian hipotesis yang dikemukakan oleh Sugiyono (2019:99) dalam bukunya, yaitu :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.”

Rancangan pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui korelasi dari kedua variabel yang diteliti. Dalam pengujian hipotesis ini, peneliti menetapkan rancangan pengujian hipotesis dengan tahap dimulai dengan penetapan hipotesis

nol (H_0) dan hipotesis alternative (H_a), pemilihan tes statistika, dan penetapan tingkat signifikan.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh positif atau negatif antara variabel independen yaitu kompetensi aparatur desa dan pemahaman teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam perumusan hipotesis statistik, antara hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a) selalu berpasangan. Bila salah satu ditolak, maka yang lain pasti diterima sehingga dapat dibuat keputusan yang tegas, yaitu H_0 ditolak pasti H_a diterima.

3.10.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji T)

Untuk menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen, maka digunakan statistik uji t. pengelolaan data akan dilakukan dengan menggunakan alat bantu aplikasi *software IBM SPSS Statisticsts* agar pengukuran data yang dihasilkan lebih akurat.

Selanjutnya untuk mencari nilai thitung maka pengujian tingkat signifikan adalah dengan menggunakan rumus :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{1-r^2}$$

Keterangan:

t = Nilai Parsial (Uji t)

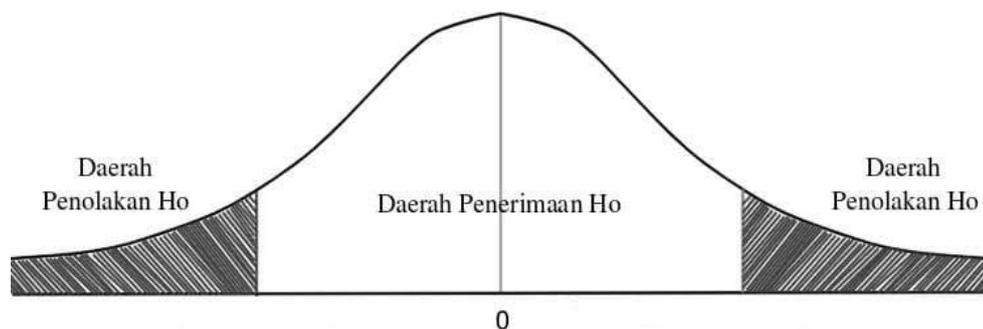
r = Koefisien Korelasi Pearson

r^2 = Koefisien determinasi

n = Jumlah sampel

Kriteria yang ditetapkan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel dengan menggunakan tabel harga kritis t tabel dengan tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebesar 0,005 ($\alpha = 0,05$).

Adapun kaidah keputusan atau kriteria pengujian yang ditetapkan adalah sebagai berikut :



Gambar 3.2
Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Uji t

$H_{01} : \beta_1 = 0$ Kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

$H_{a1} : \beta_1 \neq 0$ Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

$H_{02} : \beta_2 = 0$ Pemahaman teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

$H_{a2} : \beta_2 \neq 0$ Pemahaman teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Berhubung data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data seluruh populasi atau menggunakan sensus, maka tidak dilakukan uji signifikansi. Menurut Cooper and Schindler (2014:430) menjelaskan tentang uji signifikan adalah sebagai berikut:

“Uji signifikan dilakukan untuk menguji keakuratan hipotesis berdasarkan fakta yang dikumpulkan dari data sampel, bukan dari data sensus”. Jadi untuk menjawab hipotesis penelitian, koefisien regresi yang diperoleh langsung dibandingkan dengan nol. Apabila nilai koefisien regresi variabel independen yang sedang diuji tidak sama dengan nol, maka H_0 ditolak dan sebaliknya apabila koefisien regresi variabel independen yang sedang diuji sama dengan nol maka H_0 diterima.”

3.10.2 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Pada pengujian simultan akan diuji pengaruh kedua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Statistik uji yang digunakan pada pengujian simultan adalah Uji F atau yang biasa disebut dengan *Analysis of Variance* (ANOVA).

Menurut Sugiyono (2019:257), pengujian hipotesis dapat digunakan rumus signifikan korelasi ganda sebagai berikut:

$$F_h = \frac{\frac{R^2}{k}}{\frac{(1 - R^2)}{(n - k - 1)}}$$

Keterangan:

R = Koefisien korelasi ganda

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota sampel

$dk = (n-k-1)$ derajat kebebasan

Uji F menggunakan beberapa dasar analisis untuk menentukan pengaruh dan hubungan variabel dalam penelitian. Berikut dasar analisis yang digunakan pada uji F:

- $F_{hitung} < F_{tabel}$: maka H_0 ditolak artinya tidak terdapat pengaruh kompetensi aparatur desa dan pemahaman teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- $F_{hitung} > F_{tabel}$: maka H_0 diterima artinya terdapat pengaruh kompetensi aparatur desa dan pemahaman teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tingkat interval keyakinan yang diambil adalah 95% dengan tingkat signifikan kesalahan atau *error* sebesar *alpha* 5% (0,05). Penetapan tingkat signifikan antara variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikansi yang umum digunakan dalam penelitian sosial.



Gambar 3.3
Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Uji F

Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji statistik F) yaitu sebagai berikut:

$H_{03} : \beta_3 = 0$ Kompetensi aparatur desa dan pemahaman teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

$H_{a3} : \beta_3 \neq 0$ Kompetensi aparatur desa dan pemahaman teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3.10.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk melihat seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial digunakan koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi sebagai ukuran untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel yang digunakan. Koefisien determinasi menjelaskan proporsi variasi dalam variabel dependen (Y) dengan semua variabel independen yang menjelaskan secara bersama-sama dan nilainya selalu positif. Selanjutnya untuk melakukan pengujian koefisien determinasi (*adjusted R²*) digunakan untuk mengukur proporsi atau presentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen.

Koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini berarti bila $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila *adjusted R²* semakin besar mendekati 1 menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan bila *adjusted R²* semakin kecil bahkan mendekati nol, maka dapat dikatakan semakin kecil pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$Kd = R^2 \times 100 \%$$

Keterangan:

Kd = Besar atau jumlah koefisien determinasi

R^2 = Nilai koefisien korelasi

Sedangkan kriteria dalam melakukan analisis koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

- Jika Kd mendekati nol (0), berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah, dan
- Jika Kd mendekati satu (1), berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.